

Transportasi Online, Siapa yang Untung? / Grasak-grusuk Ahok di Sumber Waras

AKTUAL

Edisi 52 | April 2016



Cerita Mega

Megawati saat itu akan selalu jadi catatan sejarah penting untuk memotret proses besar sebuah transisi demokrasi Indonesia

ISSN 2337-8395



Rp 30.000

Foto: Tomohiko Otsuka

WWW.AKTUAL.COM

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

☎ Dedy **081 20 53 8776**
Rhiza **081 828 0941 009**

✉ marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

PENDIRI M. Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

REDAKTUR Wahyu Romadhony, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M. Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan, Vivin Sri Wahyuni

STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Leonina K Lahama, Eko Sumaryanto (Foto Komersial), Agung Rizki, Dadangsaah, Najamuddin Arfah, Refli Mulyadi, Fatah Hidayat Sidik.

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi

NETWORK Tri Wahyudi (Hd), Rendra Muhammad Nur Islam

SMC Resya Muhammad Irgi, Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Damai Oktavianus Mendrota (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A. Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu), Nelson Nafis (Yogyakarta)

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah
STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P
HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana
SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji
MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Aditya
ADMIN MARKETING Yulita Trinanda Pangastuti

ALAMAT REDAKSI
Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
Telp. 021 83794508 (Hunting)
Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
iklan@aktual.com

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

aktual

Transportasi Online, Siapa yang Untung?



Pembaca yang budiman, beberapa saat lalu terjadi demo besar supir taksi di Jakarta. Mereka protes atas ketidakadilan pemerintah dalam menyikapi kehadiran transportasi online.

Meski demo itu tidak meluas sampai ke daerah lainnya, toh ada beberapa catatan penting yang harus dicatat dari peristiwa itu.

Laporan Utama Aktual kali ini berusaha mencatat beberapa hal dibalik pertarungan antara taksi reguler dan taksi online. Aktual melaporkan bahwa yang paling diuntungkan dari demo tersebut adalah kapitalis.

Yang mendapatkan keuntungan besar akibat perselisihan antarsupir angkutan umum reguler versus online adalah para pemodal di balik bisnis bisnis transportasi taksi itu.

Di rubrik politik, ada hal menarik soal perkembangan konflik internal di partai besar Golkar. Rupanya, kali ini kubu Aburizal Bakri menang telak atas kubu Agung Laksono.

Keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Ical cukup

membuat kaget Menhukham Yasona dan kubu Agung Laksono. Apalagi keputusan MK menyatakan bahwa Menhukham dan kubu Agung Laksono diwajibkan membayar denda Rp100 miliar ke kubu Ical.

Ini rupanya yang jadi *bergaining* politik kubu Ical untuk mementahkan tekanan-tekanan politik yang dilakukan Menhukham dan kubu Agung selama ini.

Soal kasus Sumber Waras kembali dihadirkan di edisi kali ini. Kegamangan KPK untuk 'bertarung' di kasus Sumber Waras tetap jadi sorotan redaksi.

Meski KPK dalam pernyataannya tetap ingin melanjutkan kasus ini toh, banyak pengamat hukum masih melihat KPK tak mampu segarang ketika menangani kasus Anas Urbaningrum misalnya.

Alasan KPK masih tersu berkutat di alasan belum ditemukan "niat jahat"nya. Padahal audit BPK sudah terang benderang soal kasus ini.

Soal rencana pembelian Newmont juga jadi catatan khusus Redaksi. Banyak pertanyaan di sekitar keinginan Medco untuk membeli Newmont. Terutama suara dari DPR.

Wakil Rakyat mempertanyakan soal sumber dana triliunan Rupiah pinjaman dari China melalui beberapa bank BUMN yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur ternyata diduga dibuat untuk membiaya pembelian Newmont.

Dan, masih banyak beberapa tulisan menarik yang bisa pembaca nikmati di edisi kali ini.

Semoga bermanfaat...

Selamat membaca.

Redaksi

LAPORAN UTAMA

26 Menguak Sengkarut Kepentingan Bisnis Taksi Online di Indonesia

Para pendatang itu, merambah ke dunia transportasi dengan menerapkan tarif rendah ke semua jurusan.



32 Ramai-ramai Menolak Taksi Berbasis Aplikasi

Penolakan terhadap taksi berbasis aplikasi bukan cuma terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar dunia, seperti di Amerika, Eropa, dan Asia. Pemerintah setempat menerapkan kebijakan yang berbeda-beda terhadap taksi berbasis aplikasi.



36 Transportasi Berbasis Online, Kapitalisme Liberal Gaya Baru, Majikan Baru

Selagi kehidupan bertambah sukar, nafsu kepada partikularisme, mau hidup sendiri, bertambah melulu. Bukan penggabungan atau persatuan perekonomian yang dicari, melainkan persaingan dan perpecahan. Masing-masing mau hidup sendiri dan kaya sendiri.



10 AKTUAL REVIEW

“Operasi Mindset” yang Berhasil Membunuh dan Mengendalikan Bangsa Indonesia

Setiap saat rakyat kita dapat direayasa mindset-nya untuk menerima bentuk baru dari penjajahan asing dengan gembira dan gegap gempita.

12 JAKARTA RAYA

Grasak-grusuk Ahok di Sumber Waras

Ahok yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI malah sudah menyampaikan niat membeli lahan RS Sumber Waras yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).

16 JAKARTA RAYA

Sunny Tanuwidjaja: Si ‘Anak Magang’ Ahok dan Peneliti CSIS

Adalah M Sanusi (tersangka) yang mencuatkan nama Sunny, lewat kuasa hukumnya Krisna Murti. Sunny disebut sebagai penghubung antara Sanusi dengan Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja (tersangka).

20 POLITIK

Siasat Ical Taklukkan Agung dan Laoly

Salah satu alasan Agung berdamai dengan Ical disebutkan karena adanya denda sebesar Rp 100 miliar sesuai putusan pengadilan yang harus dibayar kepada pihak Ical.

24 RESENSI

Catatan-catatan Terserak Mega

Megawati adalah salah satu puzzle sejarah penting yang mampu menghubungkan puzzle-puzzle sejarah lain untuk melihat secara utuh bagaimana proses perubahan yang terjadi saat itu di Indonesia.

40 HUKUM

Setengah Tahun KPK Berkutat di Kasus Sumber Waras

Hingga tahun 2016 berjalan tiga bulan, KPK mengaku belum menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Artinya, Agus Rahardjo Cs belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk bahwa terjadi praktik tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut.

44 EKONOMI

Hapus Semua Subsidi Energi, Menteri Sudirman Berniat Langgar UUD 1945

Sudirman menginginkan subsidi energi dicabut dan dengan sengaja membiarkan harga energi mahal, agar masyarakat merasakan pahit getirnya untuk mendapatkan energi. Dengan begitu dia berharap terjadi efisiensi dari masyarakat lantaran masyarakat merasa susah dan mahal untuk menikmati energi.

48 INTERNASIONAL

“Kepretn Sang Naga” di Perairan Natuna

Ulah provokatif China menyelamatkan kapal nelayannya, yang mencuri ikan di perairan Indonesia, menimbulkan ketegangan baru dengan Indonesia. Tetapi kecil kemungkinan pecahnya konflik terbuka, karena akan terlalu mahal harga yang dipertaruhkan oleh kedua negara.

52 LIFE

Kepribadian Autentik Islam Nusantara Melalui Lesbumi NU

Sejak awal didirikan hingga saat ini, Lesbumi tetap konsisten untuk memadukan seni budaya dan religi Islam. Saat ini Lesbumi tengah aktif mengumpulkan ribuan manuskrip guna meneliti dan melembagakan kembali kepribadian autentik Islam Nusantara.

54 LIFE

Mengenal Lebih Dekat Penyakit Epilepsi

“Epilepsi adalah salah satu penyakit neurologi menahun yang dapat terjadi pada semua orang tanpa batasan usia, jenis kelamin, ras, maupun status sosial-ekonomi. Pada suatu serangan epilepsi, terjadi aktivitas atau cetusan listrik abnormal di otak, dengan bentuk manifestasi berupa serangan-serangan kejang atau bentuk lain seperti perubahan tingkah laku, perubahan kesadaran dan perubahan-perubahan lain yang hilang timbul, baik yang terasa atau terlihat.”

3	Tatap Redaksi	18	Kilas Peristiwa	46	Kilas Ekonomi
5	Terkini	22	Kilas Politik	56	Kilas Life
6	Kaki Hari	42	Kilas Hukum	58	Oase
8	Lensa Aktual				



KPK Sebut Audit BPK Alat Bukti Korupsi Pembelian RS Sumber Waras

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyebut bahwa pihaknya sudah menemukan satu alat bukti, dalam pengadaan lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Satu alat bukti tersebut menurut Alexander adalah audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengadaan tersebut. Saat ini, KPK tengah mendalami perhitungan kerugian negara yang dipaparkan dalam audit tersebut.

“Audit BPK kan berdasar permintaan KPK. Audit BPK hanya salah satu alat bukti dan indikasi kerugian keuangan negara akan didalami apa saja yang jadi kesimpulan kerugian negara,” kata Alex saat jumpa pers di gedung KPK, Selasa (29/3).

Namun dalam kesempatan kali ini ada hal menarik yang disampaikan Alex. Khusus kasus RS Sumber Waras ini, KPK belum menemukan adanya niat jahat untuk melakukan korupsi.

“Ada alasan-alasan yang akan kita gali melalui keterangan saksi. Kalau mau naikin ke penyidikan harus yakin dalam kejadian itu harus ada niat jahat bukan semata-mata pelanggaran prosedur.”

Hal itu seakan menjadi hal yang kontradiktif dengan hasil audit investigasi BPK. Dalam auditnya BPK menjabarkan soal SK Tim Kajian pembelian lahan RS Sumber Waras.

BPK menyebut ada bahwa SK Tim Kajian sejatinya baru disahkan pada 31 Desember 2014. Namun dinyatakan oleh Dinas Kesehatan telah disahkan pada Agustus 2014.

Soal SK tersebut memang diyakini oleh beberapa pihak sebagai ‘niat jahat’ praktik korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. /Wisnu Yusep



KPK Tetapkan Bos Agung Sedayu Group Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan Sugianto tersangka.

Status tersangka Aguan sendiri tertuang dalam surat cekal, yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Yang bersangkutan (Sugianto Kusuma alias Aguan) sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian, sejak 1 April 2016 atas perintah dan permintaan pimpinan KPK, kita sudah lakukan pencegahan

agar yang bersangkutan tidak bepergian ke luar negeri,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/4).

Tak hanya Agung, KPK juga mengirim surat cekal ke Imigrasi dengan inisial S. “Baik S maupun SK alias A, sudah kita lakukan pencegahan enam bulan dan langsung kita masukan ke sistem online keimigrasian. Secara langsung bisa dilakukan sebagai dasar rekan imigrasi yang berjaga di pelintasan border area.” /Wisnu Yusep

Dalam Sehari KPK Gelar Dua OTT

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa hari ini pihaknya menggelar dua operasi tangkap tangan. Keduanya dilakukan di Jakarta.

“Hari ini ada OTT di dua tempat, kasus berbeda, pagi dan malam hari (baru saja), semua OTT di Jakarta,” ujar Agus lewat pesan singkatnya, Kamis (31/3).

Berdasarkan informasi, OTT yang digelar malam ini berhasil meringkus anggota dewan. Namun, belum bisa

dipastikan apakah itu DPR ataupun DPRD.

Diketahui, OTT pertama yang digelar pagi tadi kabarnya berhasil menangkap oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Kpk Saut Situmorang.

Tapi, pernyataan Saut baru saja dibantah oleh Agus. Dia ungkapkan bahwa yang ditangkap bukan Jaksa. “Pemberinya yang di OTT.”

Terkait OTT pertama, dikabarkan memang berhubungan dengan pengurusan kasus di Kejati DKI. Sementara OTT kedua belum bisa dipastikan mengenai apa. /Wisnu Yusep



Demokrasi dan Kepemimpinan yang Lemah

Ketika reformasi digulirkan, terdapat optimisme yang meluas bahwa demokrasi bisa melahirkan kepemimpinan yang cocok dengan watak bangsanya. Apa yang terjadi, pendulum sejarah Indonesia hanyalah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.

Padahal, demokrasi memang bermaksud membasmi pemerintahan otoriter, tetapi tak bisa tegak tanpa pemerintahan otoritatif. Kenyataan kini, aneka peraturan dan pembangunan tak jalan karena karena lemahnya wibawa otoritas atas gerombolan.

Memimpin demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat menjadi simpul kesadaran baru yang terpancar dari suara Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kompas, 08/06.2006). Keinsyafan ini merupakan pertanda baik jika disertai pemahaman yang baik. Bahwa pemimpin yang baik tidak cukup sekadar berbudi baik dan menarik. Yang lebih penting adalah kesanggupan untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mesin politik dan pemerintahan yang bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Terlampau lama Republik ini dipimpin oleh Presiden yang "lemah". Presiden yang menegakkan wibawanya dengan personalisasi kekuasaan dan kekuatan pemaksa (might), bukan dengan menjalankan prinsip-prinsip negara hukum (right) yang bersifat impersonal dan imparial.

Jejak-jejak tradisi kepresidenan

seperti itu masih bertahan pada watak para pemimpin negara di era reformasi: dalam kecenderungannya untuk memprioritaskan kepentingan sendiri dan pemujaan diri, dengan keengganan untuk mengembangkan wibawa sistemik dan pelayanan publik.

Tipe kepemimpinan seperti itu memang tak selaras dengan tantangan demokratisasi. Demokrasi yang memuliakan kedaulatan rakyat menghendaki kepemimpinan yang "kuat"; yakni kepemimpinan berbasis hukum dengan menjalankan amanat konstitusi. Di sini, pemimpin negara mesti sadar bahwa demokrasi tak bisa dipisahkan dari konstitusi seperti tercermin dalam istilah "demokrasi konstitusional" (constitutional democracy). Istilah ini mengandung makna bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Dengan kepemimpinan yang committed terhadap konsitusi, ketaatan warga negara pada otoritas bukan sebagai ekspresi dari loyalitas dan ketakutan personal yang bersifat ad-hoc, melainkan sebagai ekspresi dari kesadaran hukum untuk kemaslahatan bersama yang bersifat permanen.

Dalam menjalankan demokrasi konstitusional tersebut, kepresidenan merupakan institusi yang sangat krusial. Sebagai satu-satunya pejabat negara yang dipilih langsung (secara teoritis) oleh seluruh rakyat, Presiden melambangkan harapan masyarakat

bahwa amanat konstitusi itu akan diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan dan dijalankan oleh administrasi pemerintahan secara rasional.

Komitmen utama konstitusi dan kepemimpinan negara berkhidmat pada upaya untuk mengamankan dan mencari keseimbangan dalam pemenuhan tiga pokok kemaslahatan publik (public goods). Hal ini berkisar pada persoalan legitimasi demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan identitas kolektif.

Basis legitimasi dari institusi-institusi demokrasi berangkat dari asumsi bahwa institusi-institusi tersebut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat secara imparial. Klaim ini bisa dipenuhi jika segala keputusan politik yang diambil secara prinsip terbuka bagi proses-proses perdebatan publik (public deliberation) secara bebas, setara dan rasional. Hanya dengan penghormatan terhadap prosedur-prosedur public deliberation seperti itulah, peraturan dan keputusan yang diambil memiliki legitimasi demokratis yang mengikat semua warga, dan pemerintah bisa melaksanakannya secara benar (right) dan tanpa ragu (strong).

Kenyataan menunjukkan bahwa keputusan Presiden/Wakil Presiden acap kali tak sejalan dengan legitimasi demokratis. Adakalanya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan proses-proses public deliberation, seperti dalam kasus rencana revisi Undang-Undang Perburuan dan Pencabutan SP3 Suharto. Seringkali pula tak menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh hasil public deliberation, seperti dalam penetapan anggaran pendidikan dan dalam membiarkan aksi-aksi kekerasan terhadap kebebasan sipil dan politik.

Setelah basis legitimasi diperjuangkan, kemaslahatan publik selanjutnya adalah kesejahteraan ekonomi. Demokrasi politik tak bisa berjalan baik tanpa demokratisasi di bidang ekonomi. Pancasila sendiri mengisyaratkan, bahwa ujung pencapaian nilai-nilai ideal

kebangsaan harus bermuara pada "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Negara kesejahteraan menjadi pertarungan dari kesaktian Pancasila.

Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam penciptaan masyarakat yang lebih transparan dan terbuka di bidang politik. Namun capaian-capaian ini seringkali dimentahkan oleh keterpurukan dan kesenjangan ekonomi. Dalam hal ini, Joseph E. Stiglitz (2005) punya pandangan yang menarik.

"Di Indonesia orang kerap merasakan adanya konflik yang lebih intens: konflik antara kewajiban untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih dalam sebuah sistem yang didasarkan pada aturan, dengan kewajiban moral untuk membantu kerabat dan anggota komunitas di sebuah negara yang ditandai oleh tingginya angka pengangguran, kemiskinan akut, dan ketimpangan yang mencolok.

Ekonomi pasar hanya berjalan baik dalam sebuah sistem yang dipijakkan pada aturan. Dan dalam sistem yang berjalan mulus dengan kesempatan kerja penuh dan rasa keadilan sosial yang luas, kebutuhan untuk 'membantu' kerabat sangat bisa dikurangi. Masalahnya, mereka yang berada di negara berkembang diminta untuk meninggalkan 'jaring pengaman' dalam ikatan kekeluargaan dan komunal ini, padahal jaring pengaman sosial (dari rejim kesejahteraan) itu sendiri belum tercipta."

Menciptakan kesejahteraan ekonomi di negara seperti ini, Stiglitz merekomendasikan perlunya keseimbangan antara peran pemerintah dan pasar. Dalam hal ini, negara-negara berkembang harus lebih bebas dan leluasa menentukan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi mereka.

Tidak ada cara tunggal dan sistem yang sempurna, seperti yang sering dikhotbahkan oleh para arsitek ekonomi di World Bank dan IMF. Seturut dengan itu,

pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk menjalankan amanat konstitusi dalam penguasaan bumi, air, udara dan kekayaan alam bagi kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara, sebagai mata-hati dan mata-nalar rakyat, harus berani mengambil sikap pro-rakyat dalam kasus eksplorasi kekayaan alam yang merugikan bangsa dan negara.

Semuanya itu merupakan prakondisi bagi terpeliharanya kebajikan ketiga: yakni identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia. Kemunculan Indonesia sebagai perwujudan dari civic nationalism (yang berbasis demokrasi konstitusional), dengan Pancasila sebagai titik-temu solidaritas kolektif-nya, mulai mendapatkan ancaman dari meruyaknya aspirasi politik identitas yang bersemangat partikularistik.

Fungsi pemimpin negara sebagai kekuatan moderasi di antara ekstrimitas masyarakat benar-benar sedang diuji. Betapapun mereka tampil karena dukungan partai atau kelompok tertentu, sekali mereka terpilih anasir-anasir partikularistik harus dikesampingkan demi kemaslahatan bersama.

Presiden/Wakil Presiden kerap kali terkesan melakukan endorsement secara sengaja atau tidak terhadap keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlalu mahal harganya, jika demi mobilisasi dukungan bagi pemilihan mendatang, hal-hal mendasar dari prinsip demokrasi konstitusional dikorbankan.

Krisis selalu mengandung dua sisi: ancaman dan peluang. Untuk memanfaatkan peluang di balik krisis ada kunci yang harus ditemukan. Adapun kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Bagi para pemimpin, ada baiknya menyimak kembali credo Rene de Clerq yang menjadi semboyan Bung Hatta: "Hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku. ■





LENSA AKTUAL

Dilema Reklamasi Pantai Jakarta

Seorang nelayan saat mencari ikan di lokasi proyek reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (17/3/2016). Hingga tahun 2030 mendatang Pemprov DKI Jakarta akan membangun 17 pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Demi mewujudkan rencana tersebut Pemprov DKI Jakarta siap menggandeng pihak swasta.

Munzir - Aktual

Ada banyak pertanyaan muncul ketika data “Panama Papers” muncul sebagai masalah geopolitik yang cukup serius.

Kalau Anda mengunjungi situs www.panamapapers.icij.org, ada banyak data dan tulisan yang bisa ditelan mentah-mentah. Namun, kalau kritis dan mengunyah sajian data dan tulisan di situs itu maka ada banyak pertanyaan mendasar yang bisa Anda terka dan rasakan. Bahkan bisa dijadikan bahan kritik.

Apa saja yang perlu dikritisi?

Pertama adalah soal data. Data yang berhasil “dicuri” dari perusahaan Law Firm Mossack Fonseca itu diklaim lebih besar dari data yang berhasil “dicuri” oleh Wikileaks.

Dari data itu bisa di-breakdown—jadi beberapa analisis yang sangat menarik. Di laman Panama Papers bahkan beberapa foto kepala negara, birokrat bahkan keluarga/kerabat pemimpin sebuah negara dijadikan “tersangka”. Termasuk negara sekelas Rusia dan China (entah mengapa negara sekelas Amerika Serikat atau Jepang tidak termasuk).

Kalau jeli, data yang disajikan oleh the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) itu bisa berbicara lain ketika disandingkan dengan beberapa data penting lainnya.

Coba bandingkan dengan data tahun 2012 lalu ketika sebuah lembaga non pemerintah (NGO) bernama Tax Justice Network mengeluarkan sebuah *report* penting dengan tajuk “*The Price Offshore Revisited: New Estimates for ‘Missing’ Global Private Wealth, Income, Inequality and Lost Taxes*”.

Berdasarkan riset serius yang diambil dari data IMF, Bank Dunia (World Bank), PBB, Bank for International Settlements (BIS) dan beberapa bank sentral beberapa negara ditemukan bahwa tak kurang dari USD21 sampai USD32 triliun diperkirakan ‘lenyap, tak terdeteksi dan untouchable’. Angka itu bukan hanya ulah dari satu perusahaan *law*

Seorang pria berjalan melewati poster mirip Presiden Rusia Vladimir Putin dan bertuliskan “Panama yang mana?” di sebuah halte bis di Moskow, Rusia, Rabu (6/4). Dalam bahasa Rusia “panama” berarti topi ember.



Geopolitik Panama Papers: Sebuah Catatan Kecil

firm asal Panama bernama Mossack Fonseca saja.

“A significant fraction of global private financial wealth— by our estimates, at least \$21 to \$32 trillion as of 2010 — has been invested virtually tax free through the world still expanding black hole of more than 80 offshore secrecy jurisdictions. We believe this range to be conservative...”, demikian *report* itu mengawali tulisannya.

Riset lain yang dilakukan Bloomberg juga bisa dijadikan bahan untuk membaca data Panama Papers. Beberapa saat lalu, Bloomberg secara mengejutkan menyajikan sebuah riset yang dikemas dalam sebuah tulisan bertajuk “*The World’s Favorite New Tax Haven Is the United States*”.

Tulisan singkat Bloomberg itu cukup mengagetkan. “By resisting new global disclosure standards, the U.S. is creating a hot new market, becoming the go-to place to stash foreign wealth. Everyone

from London lawyers to Swiss trust companies is getting in on the act, helping the world’s rich move accounts from places like the Bahamas and the British Virgin Islands to Nevada, Wyoming, and South Dakota”. Demikian salah satu cuplikan tulisan itu.

Dalam tulisan itu juga Bloomberg menulis seperti ini: “Rothschild, the centuries-old European financial institution, has opened a trust company in Reno, Nev., a few blocks from the Harrah’s and Eldorado casinos. It is now moving the fortunes of wealthy foreign clients out of offshore havens such as Bermuda, subject to the new international disclosure requirements, and into Rothschild-run trusts in Nevada, which are exempt”.

Dan ada juga frasa penting di tulisan Bloomberg tersebut: “Last September (2015), at a law firm overlooking San Francisco Bay, Andrew Penney, a managing director



at Rothschild & Co., gave a talk on how the world's wealthy elite can avoid paying taxes.... Rothschild said the PowerPoint was subsequently revised before Penney delivered his presentation. The firm provided what it said was the final version of the talk, which this time excluded several potentially controversial passages. Among them: the U.S. being the 'biggest tax haven in the world,' the U.S.'s low appetite for enforcing other countries' tax laws, and two references to "privacy" offered by the U.S". Cukup mengagetkan bukan?

Dengan membandingkan data Panama Papers, dengan data Tax Justice Network dan data Bloomberg bisa ditarik sebuah pertanyaan hipotetik: Benarkah ada desain besar untuk menjadikan Amerika Serikat (Nevada) sebagai tempat kejahatan pajak dan pencucian uang global baru?

Yang kedua adalah soal mengapa sorotan tulisan di laman Panama Papers lebih banyak bicara soal Presiden Putin, Presiden Assad dan beberapa rezim pemerintahan yang dekat dengan Rusia (plus Assad). Termasuk China? Mengapa Amerika Serikat (atau Jepang atau Rothschilds dan George Soros misalnya) tak masuk dalam kajian tulisan itu?

(Coba baca di: panamapapers.icij.org/the_power_players/)

Soal ini, laman *geopolitics.co* juga mempertanyakan hal tersebut. Dalam tulisan bertajuk "*Panama Papers: The Anomalies*" ditulis seperti ini: "*As observed earlier, the Panama Papers looked more like a poor propaganda retaliation against Putin and Assad than anything else, for the successful interruption to the Greater Israel plan of the Rothschilds*".

Salah satu alasan yang mendasari tulisan *geopolitics.co* tersebut adalah sebuah fakta bahwa proyek Panama Papers didanai langsung oleh beberapa pihak. Termasuk Rothschilds dan George Soros.

Sekadar informasi, beberapa saat lalu Presiden Putin telah mengumumkan bahwa Rusia akan menangkap George Soros yang dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab atas krisis ekonomi Rusia pada 1990 lalu.

Yang ketiga adalah soal apa implikasi geopolitik Panama Papers? Dan apa implikasinya buat Indonesia?

Dari beberapa fakta dan data di balik kontroversi Panama Papers sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan *early warning*.

Kalau melihat tulisan dari majalah Fortune beberapa saat lalu, kondisi perekonomian AS setelah harga minyak global hancur cukup mengkhawatirkan. Fortune mengungkap fakta bahwa sekitar 30-an perusahaan minyak dan gas besar di AS akan gulung tikar (bahkan sudah ada yang gulung tikar). Amerika Serikat (dan beberapa perusahaan minyak-gas dan bisnis jaringan bisnis Rothschilds) butuh dana yang cukup besar untuk menyelamatkan perekonomian dan bisnisnya.

Di tengah hancurnya perekonomian global kali ini, yang paling gampang dan cepat adalah menarik "dana aman" milik orang-orang kaya dunia (total sekitar USD21-32 triliun) yang saat ini di parkir di Bahama, Panama, Swiss atau tempat-tempat lain.

Dengan kata lain, Panama Papers

adalah cara paling mudah untuk menggoyang tradisi menyimpan uang di tempat tempat tadi untuk segera dipindahkan ke AS. Uang sebesar USD32 triliun bukan jumlah yang kecil.

Tujuan lain dari Panama Papers adalah kemampuannya untuk mendestabilisasi sebuah negara. Terutama negara yang "dekat" atau "mulai dekat" dengan Rusia+China dan negara-negara yang tidak ingin ikut skenario besar AS dalam Trans Pacific Partnership.

Demo sekitar 30 ribu orang di Islandia saja mampu menggulingkan PM Islandia. Meski catatan PM Islandia di Panama Papers secara hukum masih perlu dibuktikan. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia. Namun demonstrasi yang terjadi di Malaysia itu belum mampu menggulingkan rezim yang saat ini berkuasa di Malaysia.

Soal ini, Indonesia yang saat ini lagi butuh dana besar untuk pembangunan infrastruktur sangat berharap sekali agar dana sekitar 2000-an orang kaya Indonesia yang parkir di luar negeri untuk masuk. Salah satu cara secara legal agar dana itu masuk adalah lewat UU Tax Amnesty yang saat ini masih dibahas di DPR.

UU Tax Amnesty adalah taruhan terakhir Jokowi agar program-program infrastruktur Jokowi berjalan lancar. Kalau gagal maka Jokowi harus mempertimbangkan (bahkan bisa dipaksa) lagi untuk nambah utang lagi ke IMF, World Bank dan China untuk menstabilkan posisi keuangan negara.

Panama Papers bisa jadi ganjalan besar Rezim Jokowi-JK untuk memuluskan UU Tax Amnesty di DPR. Kalau tidak hati-hati menangani isu Panam Papers, demonstrasi besar-besaran soal Panama Papers bisa terjadi juga di Indonesia.

Butuh kedewasaan dan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi isu Panama Papers ini karena banyak hal yang bisa terjadi gara-gara Panama Papers ini. ■ Faizal Rizki Arief



Grasak-grusuk Ahok di Sumber Waras

Kasus Sumber Waras masih terkatung. Sudah 115 hari berlalu sejak BPK RI menyerahkan hasil audit investigasi atau 160 hari sejak laporan pertama Sumber Waras dilayangkan Amir Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tapi hingga kini lembaga antirasuah belum menunjukkan tanda-tanda kepastian pengusutan kasus ini. Di saat yang sama, keriuhan jelang Pilkada DKI 2017 sudah semakin bising. Sumber Waras tak pelak jadi salah satu yang disorot. Mengingat calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diduga kuat ikut tersangkut di kasus yang menurut BPK merugikan negara hingga Rp191 miliar. Kasus ini pun rawan terseret-seret urusan politik

DKI.

Terlepas urusan Pilkada DKI, penelusuran Aktual menemukan banyak aturan yang ditabrak Ahok di pembelian lahan Sumber Waras. Menunjukkan 'kengototan' dia mendapatkan lahan seluas 3,6 hektar meski harus merogoh kocek APBD-P DKI 2014 hingga Rp755 miliar, meski dianggap penuh kejanggalan oleh BPK DKI. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan, penentuan harga, hingga penyerahan hasil.

Dari penelusuran Aktual, tahapan perencanaan pembelian Sumber Waras tidak sesuai, alias menabrak UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan

Presiden (Perpres) No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah melalui Perpres No. 40/2014.

Misal, tidak ada dokumen perencanaan pengadaan tanah sesuai amanat Pasal 15 ayat (1) UU No. 2/2012 dan Pasal 5 Perpres No. 40/2014.

Yang terjadi, Ahok yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI malah sudah menyampaikan niat membeli lahan RS Sumber Waras yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Hal itu dituturkan petinggi RS Sumber Waras sendiri, yakni Abraham Tedjanegara. Kata Abraham, niatan itu disampaikan Ahok saat bertemu dirinya dan Ketua YKSW Kartini Muljadi pada tanggal 6 Juni 2014. Ahok rencananya ingin bangun RS Kanker dan Jantung di lahan itu.

Namun saat rapat kerja dengan Pemprov DKI di 11 Juni 2014, YKSW menyatakan tidak menjual lahan

seluas 3,6 ha itu. Pernyataan YKSW saat raker inilah yang kemudian jadi dasar Kepala Dinas Kesehatan DKI saat itu, Dien Emmawati mengeluarkan nota tertanggal 16 Juni. Isinya, antara lain menyarankan agar RS Kanker dan Jantung dibangun di tanah Pemprov DKI saja. Lokasinya di dekat kantor Dinkes di Jakarta Pusat dan Sunter, Jakarta Utara.

Bicara soal kajian, itu ternyata hanya sekali saja diadakan pada 22 Juli. Diikuti Dinkes, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Walikota Jakarta Barat. Pertemuan itu juga hanya membahas langkah-langkah bila ingin membeli lahan Sumber Waras.

Pasal 15 ayat (2) UU No. 2/2012 dan Pasal 6 Perpres No. 40/2015, dimana studi kelayakan menjadi dasar dokumen perencanaan pengadaan tanah, juga tidak dijalankan. Padahal studi kelayakan mengenai syarat-syarat pendirian rumah sakit diatur di UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, Permenkes No. 147/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit dan Kepmenkes No. 2264/2011 tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit.

Proses persiapan yang diatur Perpres No. 40/2014 Pasal 10 dan Pasal 16 UU No. 2/2012 juga tidak dijalankan sepenuhnya. Yang terjadi hanya konsultasi publik yang digelar di kantor Kelurahan Tomang pada 8 Desember dan surat permohonannya diajukan kepada Lurah Tomang pada 10 Desember.

Lalu, rapat persiapan di Ruang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUUP), Balaikota DKI, 10 Desember, pukul 13.00, sekadar membahas pembelian lahan sesuai NJOP, biaya dokumen ditanggung YKSW, serta siap memberikan pintu masuk sebagai akses bersama dan penyerahannya dilakukan ketika pelepasan hak.

Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI No. 2136/2014 pun demikian. Kepgub yang ditandatangani Ahok itu, menurut informasi yang

diperoleh Aktual, BPK menyebut disahkan 19 Desember atau setelah penandatanganan akta jual beli (AJB) antara Dien dengan Kartini dan dibuat Notaris Tri Firdaus Akbarsyah. AJB dilakukan 17 Desember, tapi tertulis 10 Desember.

Keanehan Kepgub diperkuat dari 'penyimpangan' proses dan prosedurnya. Yakni, hasil konsultasi publik yang menjadi salah satu dasar pembuatan Kepgub sesuai Pasal 19 ayat (6) UU No. 2/2012 juga dipertanyakan 'orisinalitas' digelar 8 Desember.

Terbitnya Surat Keputusan (SK) Tim Pembelian Lahan No. 2930 yang ditandatangani Dien 'bernasib sama'. Masih menurut BPK, SK baru dibuat 29 Desember dan disahkan 31 Desember. Namun di SK tertulis tanggal 8 Agustus.

Dengan begitu, dipastikan pembelian tersebut tidak melalui empat tahap pengadaan tanah untuk kepentingan publik sesuai UU No. 40/2012, Perpres No. 40/2014 jo Peraturan Kepala BPN No. 5/2012. Yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Tim Pembelian Lahan

Tidak adanya alokasi anggaran untuk menunjang kinerja tim pembelian lahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) No. 030/DPPA/2014 tertanggal 10 November 2014 yang ditandatangani Dien, memperkuat penyimpangan itu.

Dokumen hanya memuat biaya belanja modal Rp755 miliar, BPHTB Rp11,5 miliar, jasa notaris/PPAT Rp7,55 miliar, jasa appraisal Rp300 juta, pengurusan sertifikat Rp22,6 miliar, dan biaya PNPB Rp2,26 miliar.

Hal tersebut secara nyata melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72/2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.

Sejatinya, Tim Pembelian Lahan—yang dipimpin pejabat lembaga

pertanahan sesuai Pasal 49 Perpres No. 40/2014 dan Perkep BPN No. 5/2012—memiliki tugas penting dan cukup panjang prosesnya.

Secara keseluruhan, baik keanggotaan serta tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), diatur dalam Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah UU No. 2/2012 dan Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Perpres No. 40/2014.

Salah satu tupoksi yang cukup urgen, dimana ketua tim membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inventarisasi dan Identifikasi yang melaksanakan pengukuran serta pemetaan bidang tanah sebagai acuan lokasi lahan. Hasil kerja satgas tersebut, kemudian dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah serta digunakan pada proses penentuan nilai ganti kerugian (appraisal) dan pendaftaran hak.

Sehingga, acuan penentuan objek lahan yang dibeli dan harganya, harus melalui verifikasi faktual di lapangan, bukan mengacu sertifikat dan nilai jual objek pajak (NJOP) semata.

Penafikan peran NJOP sebagai patokan besaran nilai ganti rugi, juga diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 2/2012 serta Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 40/2014.

Pada UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), juga menegaskan, bahwasanya NJOP bukanlah satuan yang dipakai untuk membeli lahan. Tetapi, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sesuai Pasal 79 ayat (1).

UU No. 28/2009 turut menjelaskan, bahwasanya penentu besarnya NJOP adalah kepala daerah. Terlebih, Pemda DKI telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 16/2011 tentang PBB-P2 dan berlaku sejak 1 Januari 2013.

Di sisi lain, meski tak ada satgas yang memverifikasi ulang batas-batas bidang lahan yang bakal dibeli Pemprov, tapi sesuai peta gambar situasi tanah No. 4450/1997 tanggal 9 Juni 1997 yang ditandatangani Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanag

Tim Pansus Aset DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (kanan) bersama Direktur Utama Yayasan Kesehatan Sumber Waras Abraham Tetdjanegara saat meninjau RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, Rabu (19/8). Kunjungan dilakukan untuk mengecek lahan milik RS Sumber Waras yang dibeli oleh Pemprov DKI yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan terindikasi merugikan negara.

BPN Jakbar kala itu, Tri Suprianto, diketahui lahan HGB No. 2878 bersisian dengan Jl Tomang Utara di sebelah Utara dan Timur.

Fakta tersebut diperkuat surat No.151/-7.71162 tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani Aji Kumala saat jabat Lurah Tomang. Kalaupun RS Sumber Waras berhadapan dengan Jl Kyai Tapa di sisi Utara, hanya bagian yang bersertifikat hak milik (SHM) atas nama Perkumpulan Sin Ming Hui.

Adapun NJOP tiap lokasi, saat proses pembelian berlangsung pada 2014 silam, Jalan Kyai Tapa Rp20,755 juta/m², Jl Tomang Utara Rp7,455 juta/m², Jl Tawaqal XI (sisi Barat) Rp6,195 juta/m², serta Jl Tomang Tinggi I dan IV (sisi Selatan) Rp3,1 juta/m².

Kenyataannya, pembelian lahan memakai acuan NJOP di Jl Kyai Tapa dan itu disahkan melalui berita acara kesepakatan harga RS Sumber Waras No. 4509/2014 di Gedung Dinkes, 10 Desember, sekira pukul 15.30. Kegiatan ini ditandatangani Dien, Kartini, Tri Firdaus, Lurah Tomang Lilik Istanah, dan Camat Grogol Denny Ramdani.

Sayangnya, proses yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Perpres No. 40/2012 itu, tidak bersamaan dengan pelepasan hak YKSW, sebagaimana instruksi Pasal 76 ayat (3). Pembayarannya pun menyalahi Pasal 76 ayat (4), karena dilakukan 31 Desember atau lebih dari tujuh hari kerja.

Pelepasan hak lahan YKSW yang ditandai dengan penandatanganan AJB juga bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 99 Perpres No. 40/2014. Tak adanya keterlibatan pihak BPN pada proses pengadaan lahan, turut menyebabkan kealpaan menjalankan perintah Pasal 109-112 terkait dokumentasi peta bidang, daftar nominatif, data administrasi



hingga berita acara penyerahan pengadaan lahan.

Secara implisit, aturan tersebut tidak memperkenankan adanya permohonan penangguhan pengalihan lahan selama dua tahun sesuai permintaan YKSW ketika rapat persiapan.

Meski Pasal 121 Perpres No. 40/2014 menjelaskan pengadaan lahan bisa langsung dilakukan instansi yang membutuhkan dengan pemegang hak, bila luasnya di bawah

5 ha, tidak berarti meniadakan empat tahapannya.

“Membaca norma peraturan harus komprehensif dari hulu ke hilir,” jelas Guru Besar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita. Menurutnya, dalam akun Twitter @romliatma, Pasal 121 hanya menyangkut proses penunjukkan dan penetapan lokasi.

Sementara, Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah BPN, Noor Marzuki, menerangkan, keempat tahapan itu

sangat penting, karena memberikan kejelasan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam setiap prosesnya. Kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan output-nya terukur dan waktu pelaksanaannya pun jelas.

“Dengan demikian, pengadaan tanah akan lebih terarah, terukur, dan memberikan kepastian yang lebih jelas dalam pelaksanaan pengadaan tanah,” jelas Noor sebagaimana ditulis dalam makalahnya berjudul “Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum” dalam workshop di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Proses penganggaran Sumber Waras juga ‘menggelitik’, kendati tercantum dalam Kebijakan Anggaran Sementara serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan (APBD-P) 2014. Sepatutnya, proyek tersebut dimasukkan pada anggaran murni.

Secara norma, sesuai Pasal 154 Permendagri No. 13/2006, APBD-P dilakukan apabila ada perkembangan tidak sesuai asumsi KUA, keadaan memaksa terjadinya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan, serta keadaan darurat dan luar biasa.

Karenanya, Kemendagri pada 22 September memberikan catatan, agar memperhatikan waktu yang tersisa dan mempedomani Permendagri No. 72/2012. Menurut informasi yang diperoleh Aktual, ketika Kemendagri tengah mengevaluasi Raperda APBD-P dan menghadirkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai sekretaris daerah (sekda), pemprov mengajukan pembelian RS. Sehingga, Kemendagri menyebut proyek ini tidak dianggarkan sebelumnya. ■ *Fatah Sidik*

Masalah	Fakta	Prosedur
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Ahok ingin membeli RS Sumber Waras saat bertemu YKSW pada 6 Juni 2014 dan pakai NJOP Tak ada studi kelayakan pendirian RS Dilakukan rapat kajian sekali dan tanpa keputusan Autentifikasi konsultasi publik digelar sebelum permohonan diajukan dipertanyakan Proses persiapan tidak komprehensif Kepgub Penentuan Lokasi disahkan setelah kesepakatan harga dan AJB 	<ul style="list-style-type: none"> Harus ada perencanaan yang meliputi dasar, kelembagaan, substansi, dan dokumen perencanaan Perlu studi kelayakan syarat-syarat pendirian RS (UU No. 44/2009, Permenkes No. 147/2010, dan Kepmenkes No. 2264/2011) Persiapan harus melalui sebuah tim dan meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal, dan konsultasi publik (Pasal 16 UU No. 2/2012 dan Pasal 8-10 Perpres No. 40/2014)
Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> Saat proses evaluasi di Kemendagri, TAPD memasukan kegiatan pembelian lahan RS Sumber Waras Tidak ada anggaran untuk tim/satgas terkait Tidak dianggarkan pada APBD murni 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan anggaran tim/satgas/penilai (Permendagri No. 72/2012) Sepatutnya dianggarkan pada APBD murni (Kemendagri No. 13/2006)
Tim	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Tim Pembelian Lahan serta dibentuk satgas dan penilai Hanya SK yang ditandatangani Dinkes 	Harus ada Tim Pembelian Lahan yang kemudian membentuk satgas dan menyewa penilai (Perkep BPN No. 5/2012, Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah UU No. 2/2012, dan Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Perpres No. 40/2014)
Pengadaan	Bertemu langsung dengan pihak YKSW dan mengacu sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> Ada verifikasi faktual di lapangan melalui Satgas Inventarisir dan Identifikasi untuk mengetahui lahan yang dibeli serta penilai menentukan nilai ganti rugi (Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah UU No. 2/2012, dan Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Perpres No. 40/2014)
Penentuan Harga	Memakai NJOP Jl Kyai Tapa Rp20,755 juta/ m2sesuai sertifikat	Appraisal setelah diketahui lokasi lahan berada di Jl Tomang Utara (Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 2/2012 serta Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 40/2014)
Penyerahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Hanya melakukan pembayaran Sertifikat belum atas nama Pemda DKI Hingga kini lahan masih dipakai YKSW Tidak sesuai kesepakatan rapat persiapan 	Semenjak kesepakatan harga dan AJB, selambat-lambatnya 7 hari kerja telah diurus menjadi milik Pemda DKI (Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 76 ayat (4), Pasal 96 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 109-112 Perpres No. 40/2012)

Nama Sunny Tanuwidjaja sedang mencuat di pusaran kasus megaprojek Reklamasi Teluk Jakarta terkait dengan suap pengesahan Raperda Zonasi dan Raperda Pesisir. Dua Raperda yang menjadi 'karpet merah' bagi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Adalah M Sanusi (tersangka) yang mencuatkan nama Sunny, lewat kuasa hukumnya Krisna Murti. Sunny disebut sebagai penghubung antara Sanusi dengan Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja (tersangka).

Dapat tudingan itu, Ahok langsung gerak cepat mengeluarkan bantahan. Diakui Ahok, Sunny hanya magang di Balai Kota lantaran sedang proses penyelesaian disertasi untuk memperoleh gelar S3. "Sunny itu tidak beda dengan anak magang," begitu kata Ahok di Balai Kota DKI, Selasa (5/4).

Wartawan yang 'mangkal' di Balai Kota DKI sejak jaman Ahok masih menjadi Wakil Gubernur tentu sudah tidak asing dengan wajah Sunny. Pria berkacamata yang kerap bolak-balik keluar masuk ruangan Ahok, namun belum diketahui sebagai apa saat itu.

Aktual.com coba lakukan penelusuran mengenai sosok Sunny yang disebut Ahok sebagai 'anak magang' biasa itu. Dari hasil penelusuran sederhana, sosok Sunny menjadi janggal jika dianggap Ahok sebagai 'anak magang' biasa. Mengapa? Ini beberapa alasannya.

Peneliti CSIS

Sunny yang merupakan mahasiswa doktoral di Department of Political Science, Northern Illinois University, tercatat sebagai peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta. Peneliti di Departemen Politik dan Hubungan Internasional di lembaga yang salah satu pendirinya adalah Sofyan Wanandi.

Sofyan sendiri kerap disebut-sebut terkait erat dengan lingkaran '9 Taipan' atau dikenal juga dengan sebutan '9 Naga'. Kumpulan pengusaha kelas kakap di Indonesia yang kembali mencuat di kasus suap reklamasi Teluk

Sunny Tanuwidjaja: Si 'Anak Magang' Ahok dan Peneliti CSIS

Jakarta. Yang di dalamnya disebut-sebut antara lain ada bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan. Anak perusahaan dari Agung Sedayu yakni PT Kapuk Naga Indah, diketahui sudah mendapat izin reklamasi, selain PT Muara Wisesa Samudera anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land (APL) yang presdir-nya sudah jadi tersangka.

Mengenai sekap terjang Sofyan yang merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, pernah diungkap mantan Menteri Koordinator Ekonomi jaman Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kwan Gie saat berbicara di sebuah televisi swasta pada 21 Oktober 2014. Saat itu Kwik menyoroti peran Sofyan di belakang Pemerintahan Jokowi-JK. Kwik menyebut Sofyan bisa 'mendikte' Jokowi. "Kabar ini menyebar sangat luas," ujar Kwik saat itu.

Dalam tulisannya yang dimuat di Kompas, (10/2) tahun 2014, Kwik juga melontarkan kewaspadaan terhadap para 'cukong' penguasa media.

Ditulis Kwik: "Agar jualan mereka laku, sanjungan terhadap orang yang dijadikan target bisa dilakukan dalam bentuk semacam kampanye oleh media massanya. Dengan menyanjung secara gegap gempita setiap hari, televisi atau korannya diminati banyak orang. Ini saja sudah memberi keuntungan bagi sang cukong. Namun, dengan menyanjung orang yang berpotensi jadi penguasa

melalui media yang dimilikinya, sang cukong menanam budi pada yang bersangkutan tanpa mengeluarkan uang yang, pada waktunya nanti, akan dimanfaatkan."

Kembali ke rekam jejak Sunny, sang pria kacamata yang murah senyum.

Dewan Penasihat Populi Center

Sunny tercatat sebagai Board of Advisors (Dewan Penasehat) dari Yayasan Populi Indonesia (Populi Center). Lembaga survey yang dibentuk 6 Juni 2012 lalu saat, tepat tiga minggu sebelum dimulainya masa kampanye Pilkada DKI 2012 yang kelak dimenangkan pasangan Jokowi-Ahok.

Saat ini, Populi tercatat sebagai lembaga survey yang selalu menempatkan Ahok sebagai yang 'paling unggul' di Jakarta. Di Desember 2015 lalu, Populi Center menyebut popularitas Ahok hampir 100 persen. Sedangkan di Februari 2016 lembaga yang sama menyebut elektabilitas Ahok di atas 50 persen. Survei Populi Center di pertengahan Maret 2015 pun menarik. Karena berupaya 'memotret' persepsi masyarakat terhadap perseteruan

Ahok-DPRD DKI saat itu tentang 'Anggaran Siluman' yang saat itu sedang ramai diberitakan.

Saat merilis hasil survey, Ketua Populi Center Nico Harjanto yang merupakan doktor ilmu politik dari Northern Illinois University, mengungkapkan kalau dalam benak responden ternyata DPRD DKI 'menjelma' menjadi hanya sosok Abraham Lunggana alias Haji Lulung.



Sedangkan diketahui, saat itu Lulung tengah 'dihabisi' citranya di banyak media massa ataupun lewat meme sebagai tokoh yang seakan pelaku anggaran siluman. Sedangkan Ahok diposisikan sebagai si 'pahlawan' pemberantas korupsi (baca lagi peringatan Kwik di atas). Hasilnya: 42,6 persen responden menyatakan percaya Ahok, 7,4 persen percaya DPRD DKI, dan 50 persen tidak menjawab. Patut diketahui, hingga saat ini Lulung tidak terjerat kasus apapun.

Nico sendiri diketahui juga 'lulusan' CSIS dan merupakan pengajar di Kampus Paramadina Post- Graduate Program. Kampus yang pernah didatangi Ahok saat acara wisuda di 24 Oktober 2015 lalu. Di mana saat itu Ahok sempat 'mengejutkan' karena menjadi wali saat acara wisuda beberapa mahasiswa Paramadina yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Bernama Ima, Putri, Nurul, dan Yoga. Ahok mengakui sudah mengenal mereka sejak masih menjabat sebagai Anggota DPR RI. Saat reses dulu, para mahasiswa itu diajaknya ikut ke Belitung. Kini, mereka menjadi staff khusus Ahok di Balai Kota dan ikut membantu mengumpulkan KTP dukungan untuk Ahok maju jadi gubernur. Belum dikonfirmasi apakah lulusan Paramadina itu tergabung dalam TemanAhok.

Direktur Eksekutif CDT

CDT adalah singkatan dari Center For Democracy and Transparency (CDT). Dengan alamat situs cdt31. Tertulis sebagai lembaga tempat kajian dan riset opini publik terutama yang terkait dengan pemilihan umum di tingkat nasional dan khususnya pemilihan di daerah-daerah. Lembaga yang juga ikut mempromosikan individu untuk maju sebagai pemimpin itu punya slogan menarik. Yakni 'Bersih, Transparan dan Profesional' (BTP).

Pemberitaan di Kompas.com di 16 Agustus 2013, disebutkan kalau Sunny menjabat sebagai Direktur Eksekutif CDT. Namun saat Aktual.com menyambangi situs itu, posisi tersebut sudah diganti dan diisi orang

baru, yakni Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Tim peneliti CDT berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berpengalaman luas dalam survei sosial politik dalam beberapa waktu terakhir ini. CDT awalnya berkantor di Jalan Bendungan Hilir IV Nomor 15 Jakarta 10210 yang juga dikenal sebagai kantor tim sukses pasangan Jokowi-Ahok. Alamat yang sama juga merupakan alamat kantor dari Law Firm FIFI LETY INDRA & PARTNERS. Fifi diketahui merupakan adik kandung dari Ahok.

Disebutkan juga CDT membantu promosi dengan pengalangan dana, terutama jika calon eksekutif ataupun legislatif yang digembleng mereka tidak punya dana. Ahok merupakan pendiri CDT di tahun 2007. Sunny menjadi Direktur Eksekutif CDT saat Ahok dan Eko Cahyono ikut Pilkada Provinsi Bangka Belitung. Saat itu, Ahok kandas.

Selain nama Sunny, di CDT juga terdapat nama lain sebagai peneliti yakni YF Ansy Lema, E Sakti Budiono, Michael Victor Sianipar dan Muhammad Iqbal Lubekran. Victor Sianipar tercatat pernah mencoba peruntungan ikut 'nyaleg' di DKI pada 9 April 2014 lalu atas nasehat Ahok. Maju lewat Partai Gerindra, namun kandas karena hanya meraup 3.088 suara di Dapil I Jakarta Pusat. Dia juga tercatat merupakan staff Ahok di Balai Kota. Salah satu tulisannya 'Dinamika Politik Menyongsong Pemilu Presiden 2014' masuk di buku terbitan CSIS berjudul 'Analisis CSIS: Strategi Ketahanan Pangan, Liberalisasi Sektor Jasa dan Persaingan Usaha' Vol. 41, No. 2 Juni 2012.

CDT kelak menjadi dikenal dengan 'Ahok Center'. Lembaga yang pernah dikait-kaitkan dengan pengawasan penyaluran CSR dari pengembang. Salah satunya Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara yang groundbreaking-nya diresmikan Gubernur DKI saat itu, Jokowi. Rusun sebanyak 8 blok di atas lahan 3,3 hektar itu dibangun oleh PT. Kapuk Niaga indah (Agung Sedayu) dan PT. Jaladri Kartika Pakci (Agung Podomoro). Kedua perusahaan itu diketahui kini sedang disorot untuk dugaan kasus

suap Reklamasi Teluk Jakarta.

Rusun itu kelak dihuni oleh warga korban gusuran dari Waduk Pluit, yang lokasinya tidak jauh dari area reklamasi Pulau G. Sebuah fakta yang menguatkan kekhawatiran warga Kampung Luar Batang bahwa rencana pengusuran mereka oleh Ahok diduga kuat terkait dengan para pemodal besar. Dimana untuk Ahok pun juga serupa mengatakan ini demi merealisasikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan RTH diketahui merupakan salah satu kewajiban bagi pengembang yang sudah dapat izin reklamasi yang ditandatangani Ahok.

Cucu Pendiri Sinar Mas Group

Berdasarkan penelusuran Aktual.com, Sunny juga diinformasikan merupakan cucu dari Eka Tjipta Widjaja, pendiri Sinar Mas Group di tahun 1962. Perusahaan raksasa yang disebut merupakan salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia yang memiliki banyak anak usaha seperti Asia Pulp & Paper dan produsen minyak sawit PT SMART Tbk. Namun hingga berita ini diturunkan, Sunny belum bisa dikonfirmasi.

Ahok sendiri pernah mengungkapkan soal anak magang dari keluarga pengembang, meski tidak menyebut nama Sunny. Dia hanya mengatakan kalau banyak 'anak magang' di Balai Kota DKI yang merupakan anggota keluarga pengembang.

Ahok hanya menyebut Melvany Kasih, putri Presiden Direktur Bank Artha Graha (berafiliasi dengan Artha Graha Group), Andy Kasih yang menjadi staff khusus Gubernur.

Sedangkan pengembang yang 'menitipkan' anaknya untuk magang seperti penuturan Ahok yakni: anak General Manager (GM) Sinarmas Land dan anak CEO Lippo Group Roy Tirtadji. Ahok mengucapkan itu Oktober 2015. Ada 25 anak magang di periode itu untuk program magang yang disebutnya berjalan selama tiga bulan dan sudah mulai sejak 28 September. Sedangkan Sunny, terpantau berada di Balai Kota DKI sejak Ahok masih menjadi Wagub. ■

M Vidia Wirawan



Dukung Ahok, Sejumlah Kader Hanura DKI Mundur

Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Hanura DKI Jakarta, Rahmat HS, menyatakan mundur sebagai kader partai besutan Wiranto tersebut.

Hal itu dilakukan menyusul adanya sikap partai yang meminta kadernya yang tidak sepakat dengan keputusan mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

pada Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk mundur atau dimundurkan.

“Hari ini saya jawab, tidak perlu dari 24 jam, saya jawab bersama Pak Bustomi Rahawarin (Wakil Ketua DPD Hanura DKI, red), mundur dari keanggotaan Hanura,” ujar ia, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (27/03).

Adapun alasannya, keputusan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Hanura.

“Ahok juga telah menghina parpol. Tapi, justru parpol mendukungnya. Enggak masuk di logika saya ini,” tegas ketua umum Forum Pemuda Betawi (FPB) tersebut.

“Ini juga menunjukkan konsistensi dan komitmen saya,” pungkas Rahmat yang mengenakan kaos putih bertuliskan “Hati Nurani Sampai Mati No Ahok!!!”. /Ferro Maulana

Yusril Siap Hadapi Pemprov DKI Jakarta Jika Makam Keramat Luar Batang Digusur

Usaha Pemprov DKI dalam memperluas daerah resapan di DKI dengan memperbanyak Lahan Terbuka Hijau (RTH) kerap menerima perlawanan dari para warga yang hendak digusur. Bahkan, makam keramat pun tak luput dari sasaran pemprov DKI.

Mendengar Makam Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara Bakal digusur, Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra siap membela kawasan tersebut. Sebab dikawasan tersebut tak hanya padat pemukiman, namun juga banyak terdapat situs bersejarah, termasuk Makam Ulama Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus.

“Jam 10 malam ini saya akan diundang oleh masyarakat Luar Batang yang kabarnya akan digusur oleh pemerintah DKI, padahal di situ ada situs penyebar Islam. Dan menurut saya faktor budaya



masyarakat Betawi dan Islam itu harus dipertahankan jangan digusur begitu saja,” ujar Yusril di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jum’at (25/3).

Bagi Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu, ia akan mendukung kaum yang tertindas berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.

“Saya belajar hukum saya belajar filsafat, selama ini banyak sekali membela kasus-kasus setara di pengadilan,” ujarnya.

Yusril menambahkan, persoalan kesetaraan hukum memang menjadi persoalan yang mendesak di setiap lapisan masyarakat.

“Saya tentu antusias dan semangat sekali untuk membela kawasan tersebut, untuk masyarakat Islam dan situs sejarah yang ada di kawasan itu, kalau diadakan penataan, ya tentu diadakan penataan, tidak serta merta dijadikan jalur hijau lalu orang dipindahkan ke tempat lain,” tandasnya. /Wahyu Romadhoni

Ahok Kuat, Tapi Masih Bisa Dikalahkan

Oleh: Denny JA

Saya sering ditanya oleh wartawan dan politisi soal apakah Ahok bisa dikalahkan di pilkada DKI 10 bulan lagi. Ini mungkin karena mereka melihat pengalaman saya sudah memenangkan 3 pemilu presiden dan 30 gubernur selama saya berkarir sebagai konsultan politik.

LSI juga sudah melakukan riset pada bulan Maret 2016. Banyak data yang belum diungkap lembaga survei lain yang sebenarnya bisa memberikan gambaran utuh.

Ini pendapat saya selaku profesional. Silakan disebarkan opini saya ini sehingga saya tak perlu lagi melayani permintaan wawancara aneka media.

Ahok memang kuat tapi bisa dikalahkan karena lima alasan, berdasarkan data survei dan pengalaman.

10 bulan sebelum hari H Pilkada, posisi Ahok memang cukup kuat. Dukungan Ahok di atas 50 persen. Kepuasan atas kinerjanya di atas 60 persen.

Namun Basuki Purnama masih bisa dikalahkan. Ini data yang belum diungkap lembaga survei lain. Bahwa di atas 70 persen publik merasa Ahok bisa dikalahkan.

Sentimen Ahok bisa dikalahkan merata di aneka segmen pemilih: kaya-miskin, muda-tua, apapun agamanya, apapun partai pilihannya.

Mengapa Ahok bisa dikalahkan?

5 Alasan:

1. Banyak contoh opini publik berbalik dalam waktu 10 bulan.
2. Lebih dari 40 persen Muslim Jakarta tak bersedia dipimpin non-muslim. Perjuangan anti Ahok dalam 10 bulan ke depan menjadi kuat karena motif keagamaan. Terlepas kita suka atau tidak, ini perilaku pemilih Jakarta yang terpotret.
3. Partai besar tak ingin Ahok menang jika Ahok menggunakan jalur independen. Yang mereka khawatirkan bukan Ahok di DKI, tapi meluasnya eforia calon independen

di daerah lain. Ini membahayakan eksistensi partai dalam pilkada.

Jika Ahok menang dengan maju melalui jalur independen, warung partai politik akan sepi diminati di pilkada berikutnya. Partai besar akan sekuat tenaga bersatu agar ini tidak terjadi.

Jika akhirnya partai besar mendukung Ahok mungkin karena Ahok membatalkan maju lewat jalur independen. Marwah partai besar jelas terganggu jika mereka hanya menjadi pelengkap saja dari Ahok yang sah maju sebagai calon independen.

Partai besar yang bersatu melawan Ahok karena alasan survival, itu akan menjelma mesin raksasa.

4. Lebih dari 40 persen pemilih tak suka karakter Ahok. Mereka suka ketegasan Ahok. Namun pernyataan kasarnya di depan publik tak disukai. Misalnya ketika ia menghardik seorang ibu dengan pernyataan "Ibu Maling" yang beredar luas.
 5. Lebih dari 40 persen pemilih tak suka kebijakan publik Ahok yang terkesan tebang pilih. Tegak dan keras terhadap rakyat kecil dalam kasus pengusuran. Namun lemah terhadap para taipan dalam kasus reklamasi pantai, yang dianggap merusak lingkungan dan potensial menenggelam beberapa pulau kecil.
- LSM yang bergerak di bidang pengusuran, lingkungan hidup dan hak asasi manusia potensial menjadi lawan Ahok.

Dengan lima alasan ini, Ahok masih mungkin dikalahkan sebagaimana Fauzi Bowo yang dulu dominan dikalahkan oleh Jokowi yang *underdog*. Atau Bibit Waluyo yang dulu dominan di Jateng dikalahkan oleh Ganjar Pranowo yang *underdog*.

Namun tentu saja, Ahok juga masih mungkin menang. Sebagaimana Ahok masih mungkin dikalahkan. Ini tergantung apa yang terjadi dalam ruang publik Jakarta 10 bulan ke depan.

Gubernur Kepri Akan Disemayamkan di Tanjungpinang



Jenazah Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, akan disemayamkan di kediaman pribadinya, Jalan Cempedak Kota Tanjungpinang, kata anggota DPRD Kepri Surya Makmur Nasution di Batam, Jumat (8/4).

Ia mengatakan protokoler Pemprov Kepri sedang mengupayakan mencari pesawat carter langsung ke ibu kota provinsi untuk membawa gubernur dua periode itu dari Jakarta.

"Karena pesawat reguler Sriwijaya sudah tidak bisa lagi karena waktunya," kata Surya Makmur, terkait meninggalnya gubernur itu Jumat siang di Jakarta.

Surya belum dapat memastikan lokasi Gubernur Kepri akan dimakamkan, apakah di tanah kelahirannya Kabupaten Karimun atau di ibu kota provinsi Tanjungpinang.

Saat ini jenazah Gubernur yang akrab disapa ayah itu masih berada di RS Abdi Waluyo Menteng Jakarta.

Ia mengatakan, sebelum meninggal, Gubernur masih sempat berbincang dengan Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang datang ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo mewakili dirinya.

Gubernur Kepri meninggal dalam usia 74 tahun meninggalkan seorang istri, Aisyah Sani dan tiga orang anak masing-masing Herry Andrianto, Henny Andriani dan Riny Fitriani.

/Zaenal Arifin



Siasat Ical Taklukkan Agung dan Laoly

Rumah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid di Raffles Hills, Cibubur, Rabu (2/3) ramai tak biasa.

Spanduk bertulis 'Syukuran DPD I Partai Golkar Se-Indonesia Atas Pengesahan Munas Bali oleh MA' terpasang didepan rumah. Puluhan mobil mewah malam itu merapat di rumah mantan Ketua Umum PSSI itu.

Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto. Tidak hanya itu, hadir pula calon Ketua Umum Partai Golkar, seperti Aziz Syamsudin dan Priyo Budi Santoso. Ada juga Syarif Cicip Sutardjo dan

Ridwan Bae. Tapi tidak ada Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie di acara itu.

"Beliau sedang di luar kota," kata Idrus kepada wartawan di kediaman Nurdin Halid, Rabu (2/3).

Elit Partai Golkar berkumpul di rumah Nurdin bukan tanpa alasan. Sehari sebelumnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi yang diajukan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Amar putusannya menolak kasasi yang diajukan pemohon," kata Juru Bicara MA Suhadi, Selasa (1/3).

Suhadi menjelaskan, majelis

kasasi yang menyidangkan permohonan Golkar kubu Ancol itu dipimpin oleh hakim agung I Gusti Agung Sumanatha, dengan dua hakim anggota yaitu Sunarto dan Mahdi Soroinda Nasution mengambil keputusan sehari sebelumnya.

Sesuai dengan putusan PN Jakarta Utara Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali dinyatakan yang sah. Sementara Munas yang digelar oleh Agung Laksono dinyatakan tidak sah pada putusan yang dibacakan pada tanggal 24 November 2015 silam.

Selain itu PN Jakarta Utara juga memutuskan tiga pihak tergugat yakni pemerintah dalam hal ini

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Agung Laksono (kanan) dan Ketua DPP Yorrys Raweyai memimpin pertemuan dengan Barisan Muda Partai Golkar dan pimpinan ormas di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (19/2). Silaturahmi tersebut dalam rangka persiapan Musyawarah Nasional.



Yasonna Hamonangan Laoly

Kementrian Hukum dan HAM, Agung Laksono dan DPD II Golkar Jakarta Utara membayar denda imateril sebesar Rp100 miliar.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly tidak dapat menutupi kekecewaannya. Ia berdalih putusan MA telah merusak upaya dirinya mendamaikan kedua kubu yang berselisih.

"MA buat bom baru. Yang pasti kita kecewa. Maksud teman-teman di MA itu apa? Kok bisa sampai begitu. Lihatlah dinamika yang ada," ujarnya Kamis (3/3).

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebut langkah MA berpotensi membuat kegaduhan politik baru. Pasalnya sebelum kasasi kubu Agung ditolak MA sudah terjadi kesepakatan oleh keduanya untuk menggelar Munas bersama.

"Saya kira teman-teman di MA harusnya mengetahui ini. Karena ini dikawal oleh media massa dan masyarakat. Ini kan untuk kepentingan bersama supaya tidak terjadi kegaduhan politik lagi," ujarnya.

Agung Menyerah

Kemenangan kubu Aburizal memang merubah suhu politik di internal Golkar. Sebelum putusan tersebut diketok sejumlah kader

partai beringin berlomba-lomba menggelar kampanye mengajukan diri sebagai Ketua Umum Golkar yang akan dipilih dalam Munas bersama. Sebut saja Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Sekjen Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua MPR Mahyudin dan politisi Golkar Airlangga Hartarto sudah menggelar *roadshow* ke DPD I dan DPD II untuk menggalang dukungan.

Namun pasca putusan tersebut semua pihak langsung menarik diri. Salah satu alasannya adalah ketidakjelasan waktu pelaksanaan Munas.

"Untuk saat ini, tim saya *cooling down* dulu untuk *roadshow*, keliling, sehingga lebih mengutamakan tugas MPR," kata Mahyudin.

Mahyudin bahkan menyebut tidak ada yang bisa mengetahui kapan Ical akan bersedia menggelar Munas. "Munas Golkar hanya Tuhan yang tahu jadi atau tidaknya," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Selain soal ketidakjelasan jadwal Munas di sisi lain perlawanan kubu Agung juga sudah tidak lagi tampak. Informasi yang dihimpun Aktual.com kubu Agung sudah tidak ingin lagi melawan. "Mas Agung sudah lempar handuk, dia menikmati

perdamaian dengan Ical," ujarnya sumber Aktual.com.

Salah satu alasan Agung berdamai dengan Ical disebutkan karena adanya denda sebesar Rp 100 miliar sesuai putusan pengadilan yang harus dibayar kepada pihak Ical. Kubu Munas Bali lantas menawarkan solusi kepada Agung tidak perlu membayar denda. Tapi syaratnya Agung harus patuh pada kubu Ical. Tawaran itu diterima oleh Agung.

Ical lantas memasukkan Agung pada kepengurusan yang akan diajukan kepada Kemenkumham. Dalam kepengurusan itu Agung didapuk sebagai Wakil Ketua Umum. "Sebenarnya Agung mintanya Ketua Harian tapi tidak dikabulkan oleh Ical," ujar sumber.

Kedua kubu juga sepakat untuk menggelar Munas. Asal Menkumham mau menyetujui susunan kepengurusan yang disebut "Bali Plus" itu. Sebutan itu mengacu pada penambahan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Bali ditambah pengurus versi Munas Ancol.

Ical menyebut tidak ada kendala dalam pelaksanaan Munas. Meskipun ia dinyatakan menang oleh MA, Ical tetap berkomitmen untuk menggelar Munas. "Tidak ada hambatan kira-kira sebelum Ramadhan Munas akan dilaksanakan," ujar Ical, Rabu (30/3).

Agung pun membenarkan kesepakatan itu. Ia menjelaskan Ical sepakat memasukkan Agung dalam kepengurusan dengan 75 orang pengurus Munas Ancol.

"Rencananya pertengahan Mei, antara tanggal 15-17 Mei. Itu kesepakatan saya dengan Pak Ical," ujarnya.

Informasi yang dihimpun Aktual juga menyebutkan kubu Ical masih terus melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah. Khususnya terkait dengan denda Rp100 miliar yang juga harus dibayar oleh Kemkumham. Kubu Munas Bali menawarkan pemerintah tidak perlu membayar Rp100 miliar jika menyetujui SK kepengurusan Partai Golkar versi Bali Plus yang akan diserahkan bulan ini. ■ Wahyu Romadhony

PNPM Berakhir di Bawah Naungan Kemendagri

Kesimpangsiuran informasi mengenai berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan mendapat perhatian serius dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di mana, program tersebut sebenarnya telah berakhir sejak 31 Desember 2014 yang lalu.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika menjelaskan, pemerintah pada periode sebelumnya yang dimandatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun 2007 memiliki program yang disebut PNPM Mandiri Pedesaan. Di bawah PNPM, terdapat sub-sub kegiatan yang bertujuan untuk percepatan pembangunan pedesaan. Berbagai proyek tersebut dikerjakan melalui bantuan dari bank dunia.

“Program tersebut melahirkan 2 istilah pendamping desa, yakni fasilitator kabupaten/kota dan fasilitator kecamatan. Mereka direkrut dan dikontrak sejak Tahun 2007, dan berakhir Pada Desember Tahun 2014 seiring dengan berakhirnya program PNPM,” ujar Erani di Jakarta, Rabu (30/3).

Menurut Erani, berakhirnya kontrak tersebut tertuang dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/2015 yang ditanda tangani Kemendagri dan Kemendesa PDTT. Hal ini sekaligus menampik anggapan bahwa Kemendesa PDTT adalah kementerian yang menghentikan program PNPM.

“Kontrak telah berakhir sejak di bawah naungan Kemendagri. Bukan kami (Kemendesa PDTT) yang mengakhiri PNPM. Bahkan dalam BAST, telah ditujukan kepada gubernur dan bupati tentang pengendalian PNPM. Berarti, aktifitas PNPM masih berlangsung di kalangan masyarakat dengan



pembinaan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemda dapat melanjutkan kontrak yang bersumber dari dana APBD.”

Kemudian pada Tanggal 1 Juli 2015 lanjut Erani, Kemendesa PDTT mengaktifkan kembali eks PNPM, dengan menjadikan Fasilitator kabupaten sebagai Tenaga Ahli Desa yang bertugas di kabupaten, dan Fasilitator Kecamatan sebagai Pendamping Desa yang bertugas di level kecamatan.

“Kenapa kami aktifkan kembali, pertama pada masa itu Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana desa tahap pertama. Sehingga membutuhkan pengawasan dan pendampingan. Sedangkan pada fase itu, kami masih dalam proses mempersiapkan rekrutmen pendamping desa yang baru. Untuk mengantisipasi kekosongan ini, maka kami putuskan untuk mengaktifkan kembali eks PNPM.”

Kontrak pertama yang dilakukan Kemendesa PDTT terhadap eks PNPM berlaku untuk 1 Juli 2015 hingga 31 Oktober 2015. Dengan asumsi, bahwa dalam tenggang waktu tersebut, proses rekrutmen pendamping desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi telah selesai. Namun karena rekrutmen belum selesai sepenuhnya, Kemendesa PDTT kembali memperpanjang kontrak eks PNPM hingga 31 Desember 2015.

“Tapi ternyata, desember 2015 juga belum sepenuhnya rampung. Masih ADA 7 Provinsi yang belum selesai proses rekrutmennya. Akhirnya, kami memutuskan untuk memperpanjang kontrak kembali hingga 31 Maret 2016. Dan sekarang,

proses rekrutmen sudah selesai sepenuhnya. Artinya, kontrak eks PNPM sudah berakhir tanggal 31 Maret 2016.”

Erani menerangkan, keputusan Kemendesa PDTT dalam mengaktifkan kembali eks PNPM tersebut adalah untuk memastikan dana desa dapat tersalurkan dan dimanfaatkan dengan baik. Terkait rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan transparan, hal tersebut adalah amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang harus dilaksanakan.

“Dalam amanat Undang-Undang Desa, kami harus melakukan rekrutmen terbuka, transparan dan adil. Maka semangat rekrutmen terbuka ini, menjadi cita-cita kami. Dan saya kira ini adalah keinginan semua pihak. Saya selaku Dirjen PPMD, bertugas memastikan ini berjalan dengan sehumat-hormatnya.”

Sebelumnya, Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar juga mengatakan, bahwa rekrutmen pendamping desa telah dilakukan secara transparan dan terbuka. Menurutnya, rekrutmen tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Desa, dan telah diatur dalam Permendesa No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

“Rekrutmen Pendamping Desa dilakukan seterang sinar rembulan. Tidak ada yang ditutup-tupi dan tidak ada yang diistimewakan termasuk eks PNPM. Semua posisinya sama.”

Menteri Marwan menegaskan, proses rekrutmen pendamping desa, telah memenuhi azas keadilan, dengan tidak mengistimewakan pihak manapun termasuk eks PNPM. Eks PNPM bahkan diberi kebebasan untuk mengikuti proses rekrutmen, jika berkeinginan menjadi pendamping desa.

“Rekrutmen sebelumnya, ada eks PNPM yang lulus menjadi pendamping desa. Rekrutmen selanjutnya kalau eks PNPM ada yang ingin ikut, ikut saja, ikuti proses yang ada.” /Wisnu Yusep

Sekjen PDI-P Pastikan Tidak Dukung Ahok



Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya sedang menggodok terobosan khusus dalam penjarangan calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Ia menuturkan partai akan bergerak ke bawah untuk mendengar aspirasi masyarakat, di samping menjalankan *survei polling*. Sehingga, kata dia, skala prioritas saat ini yakni mendorong penyelesaian Undang-undang yang mengatur tentang pilkada serentak.

Hasto mengaku PDIP sudah mempersiapkan cagub DKI melalui sekolah calon kepala daerah (cakada).

“Kami pastikan yang kami calonkan adalah mereka yang memiliki kemampuan mengelola pemerintahan dan berikan jawaban bagi masalah DKI untuk atasi berbagai persoalan,” ujar Hasto saat menghadiri acara ‘Konvensional Haluan Negara’ di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).

Menyinggung siapa nama tersebut sekaligus menandakan tak akan mengusung calon incumbent Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Hasto hanya mengatakan sedang dipersiapkan.

“Ada lah, kami persiapkan,” katanya. /Wahyu Romadhoni

Sikap Indonesia Atas Pelanggaran Kapal Pencuri Ikan Tiongkok Sesuai Hukum Laut

Analisis hukum internasional, Intan I Soeparna mengatakan bahwa sikap Indonesia atas pelanggaran kapal Tiongkok Kway Fee 10078 yang diduga mencuri ikan (illegal fishing) di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen, sudah sesuai ketentuan hukum laut Internasional.

“Karena berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas laut teritorial dan ZEE,” kata Intan, Kamis (24/3).

Saat diminta tanggapan atas insiden kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal “coastguard” atau keamanan laut milik China di kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ia merinci alasan sikap tepat pemerintah Indonesia.

Menurut dia, berdasarkan pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai ‘coastal state’ memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE.

Ada Dua Matahari di Kabinet, Menko Rizal Sebut 2016 Perlu Tim Yang Solid

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku ada ‘dua matahari’ dalam tubuh kabinet kerja Jokowi-JK.

Bagi Rizal, rakyat memiliki harapan yang tinggi terhadap pemerintah saat ini, namun sayangnya harapan perlahan pudar sejak bulan kesepuluh Jokowi-JK memimpin.

“Untung ketolong dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang tegas, yang banyak *common sense*-nya dan *hands on*. Kemudian dilakukan *reshuffle* Agustus,” kata Rizal, di Jakarta, Kamis (31/1).

Sejak itu pula, lanjut Rizal, pemerintahan Jokowi bangkit dan membalikkan keadaan sehingga

Indonesia juga berhak untuk melakukan tindakan seperti ‘boarding’, inspeksi, penahanan dan melakukan proses hukum untuk menegakkan hukum penangkapan ikan yang sesuai dengan UNCLOS.

“Jadi, negara Tiongkok seharusnya menghormati hukum yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 58 UNCLOS, negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai ‘coastal state’,” kata doktor lulusan Vrije Universiteit Brussel, Belgia itu.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh kapal keamanan laut Tiongkok yang berusaha menghalangi pihak Indonesia untuk mengamankan kapal Kway Fee adalah melanggar Pasal 58 dan 73 UNCLOS.

Kapal keamanan laut Tiongkok juga telah melakukan intervensi terhadap usaha Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UNCLOS.

Sedangkan Indonesia, kata dia, dapat melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan pada anak buah kapal (ABK) Kway Fee sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 73 UNCLOS. /Karel Stefanus Ratulangi



persepsi masyarakat kembali positif.

Hal tersebut terlihat dari lonjakan jumlah delegasi bisnis negara sahabat yang datang ke Indonesia. Momentum itu harus dipertahankan agar pada 2016 ini terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

“Supaya pada 2016 benar-benar menjadi tahun percepatan ekonomi, untuk itu perlu tim yang solid, tim yang satu garis dengan presiden dan itu penting sekali. Di setiap negara atau organisasi tidak boleh ada dua matahari,” ujar dia. /Karel Stefanus Ratulangi



MEGAWATI DALAM CATATAN WARTAWAN

MENANGIS & BERTAWA



Catatan-catatan Terserak Mega

Hendropriyono bergegas-gegas menuju Halim, dan menanyakan kepada Presiden soal PDI. Jawaban Pak Harto sungguh di luar dugaan sebelumnya.

“PDI itu kecil, bukan apa-apanya Golkar”, kata Hendro menirukan ucapan Pak Harto saat itu.

“Siapa pun yang menjadi Ketua Umum PDI tidak perlu dirisaukan,” lanjutnya.

Maka pulanglah Hendropriyono ke kantornya dan semakin yakin bahwa Munas harus di Jakarta, dan mengesahkan Megawati Soekarnoputri yang terpilih secara

demokratis di KLB harus segera dilaksanakan....

Entah mengapa, Soeharto berkata seperti itu ke Panglima Daerah Militer DKI Jakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI A.M Hendropriyono yang saat itu ditugaskan untuk menyelesaikan konflik di PDI melalui Munas.

Yang menarik, saat itu justru Hendropriyono lah yang menganggap KLB PDI di Surabaya yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI secara de jure adalah sah. Meski pemerintah (Depdagri dan panglima ABRI) secara tegas menolak hasil KLB tersebut.

Beberapa kali calon Ketum PDI yang dapat restu dari pemerintah (baca: Pak Harto) yakni Budi Hardjono dan Latief Pudjosakti sempat bertemu dengan Hendro untuk membahas soal konflik PDI. Namun, baru kemudian hari ketahuan bahwa Hendro ternyata ada di pihak Megawati Soekarnoputri.

Melihat fakta seperti ini, Depdagri dan Panglima TNI memutuskan untuk tidak mengizinkan Munas diselenggarakan di Jakarta. Rencananya akan dipindahkan ke Kopo, Jawa Barat untuk menghindari campur tangan Hendropriyono di Munas itu.

Dan sejarah bercerita, Munas PDI berhasil diselenggarakan di Hotel Kemang Jakarta pada akhir Desember 1993. Munas itu menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998...

Itu salah satu catatan kecil sejarah yang direkam mantan jurnalis Surya

Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri (tengah) berfoto bersama 22 penulis saat peluncuran buku "Megawati Dalam Catatan Wartawan Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat" di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu (23/3).

(Surabaya) dan Kompas, Yoseph Umarhadi. Dan ada sekitar 22 orang jurnalis lain bertutur sejarah soal Megawati Soekarnoputri, PDI dan PDI Perjuangan.

Mereka bertutur cerita-cerita kecil yang dulu tampak remeh dan bahkan dianggap biasa saja, namun kini bisa jadi catatan-catatan sejarah penting yang bisa jadi catatan penting untuk mengungkap sebuah lakon sejarah yang lebih besar.

Menikmati buku ini seperti mengembalikan ingatan ke tahun-tahun penting yang mengubah Indonesia. Meski hanya melihat dari satu sudut pandang, Megawati Soekarnoputri, namun sesungguhnya Megawati adalah salah satu *puzzle* sejarah penting yang mampu menghubungkan *puzzle-puzzle* sejarah lain untuk melihat secara utuh bagaimana proses perubahan yang terjadi saat itu di Indonesia.

Kalau Anda punya banyak versi cerita sejarah bagaimana Indonesia mengalami perubahan yang sangat dahsyat pada tahun 90-an, maka cerita-cerita kecil Megawati di buku ini akan sangat membantu Anda untuk merekonstruksi ulang dan jadi kunci beberapa *missing link* antara cerita sejarah satu dengan cerita sejarah lainnya.

Karena, menurut Aristides Katoppo yang juga ikut berkontribusi

dalam bentuk tulisan di buku ini, Megawati memiliki peran sangat besar dalam proses transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia saat itu.

Jadi, *what, when, who, why* dan *how* yang terjadi di sekitar Megawati saat itu akan selalu jadi catatan sejarah penting untuk memotret proses besar sebuah transisi demokrasi Indonesia yang sampai saat ini jadi bahan pujian oleh banyak negara

bangsa lain.

Buku setebal 228 halaman yang di-cover-nya tertulis "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" ini perlu dijadikan salah satu referensi untuk memotret sebuah proses transisi demokrasi pada tahun 90-an.

Kristin Samah sebagai editor buku ini cukup jeli dalam menyajikan dan menempatkan cerita-cerita kecil Megawati ini menjadi sebuah buku yang layak baca. ■ Faizal Rizki Arief



Judul:
**Menangis dan Tertawa
Bersama Rakyat**
Penulis:
Kristin Samah
Penerbit:
Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit:
Februari - 2016
Jumlah Halaman:
240



Warga mencari transportasi dengan aplikasi online di Jakarta, Kamis (17/3). Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendorong pemilik kendaraan dari aplikasi transportasi online agar bisa memenuhi perizinan sesuai dengan perundang-undangan.



Menguak Sengkarut Kepentingan Bisnis Taksi Online di Indonesia

Ibukota belum lama ini digegerkan adanya demonstrasi besar-besaran dari pengemudi taksi konvensional. Aksi para supir itu tak hanya menimbulkan dampak kemacetan atau bahkan memicu aksi kekerasan yang menjurus vandalisme, tapi juga sekaligus mengagetkan.

Betapa tidak, para sopir taksi yang selama ini jauh dari kata demonstrasi, tapi kini mulai goyah juga. Gara-garanya, kenyamanan mereka seperti mulai terusik dengan kehadiran taksi berbasis aplikasi online Grab dan Uber.

Para pendatang itu, merambah ke dunia transportasi dengan menerapkan tarif rendah ke semua jurusan. Tentu saja dalam waktu yang tak begitu lama, memiliki pangsa pasar yang lumayan besar. Sehingga dianggap telah menggerus 'pendaringan' tak hanya para pengemudinya, tapi juga perusahaannya.

Akan tetapi, kilah perusahaan taksi ini tak melulu soal harga atau tarif yang dikeluhkan, melainkan dalam mekanisme lain yang lebih penting, yaitu aturan. Pasalnya, ketika taksi online ini sudah terjun ke ranah kompetisi, mereka malah banyak mengingkari aturan, dalihnya hanya sebagai perusahaan penyedia IT bukan perusahaan transportasi.

Kondisi ini yang membuat pemain besar dunia angkutan umum di ranah taksi teriak. PT Blue Bird Tbk (BIRD) dan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) merasa tersisih dengan kehadiran taksi online ini. Selama ini kedua perusahaan itu menjadi ikon taksi Ibukota dengan memiliki porsi pasar terbesar, dengan si Burung Biru yang menjadi *leader*-nya.

Kendati belum mengakui seberapa besar dampaknya terhadap kinerja perseroan, tapi ditengok dari laju nilai saham keduanya sempat terus melandai.

Ratusan supir taksi dan Bajaj melakukan aksi demo menolak keberadaan angkutan umum online di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3). Ribuan sopir taksi, bajaj dan sejumlah angkutan umum lainnya melakukan mogok massal untuk menolak keberadaan transportasi umum berbasis aplikasi.

"Dampak langsung terhadap kinerja keuangan kami belum diketahui sebelum ada laporan yang *audited*," tegas Direktur Blue Bird, Sigit Priawan Djokosoetono, di Jakarta, medio Maret lalu.

Kinerja saham BIRD sendiri sehari sebelum dan sesudah aksi demonstrasi mengalami tren depresiasi. Pada Senin, 21 Maret 2016, BIRD dibuka di level Rp6.010 per lembar saham, kemudian menguat 5,3 persen ke angka Rp6.425. Namun kemudian di saat aksi demo pada Selasa, 22 Maret berlangsung, sorenya saham BIRD melemah ke Rp6.400.

Pelemahan masih terjadi sehari setelahnya, Rabu, 23 Maret 2016. Hari itu, saham BIRD melemah 1,17 persen ke angka Rp6.325. Bahkan pada perdagangan Rabu itu, frekuensi perdagangan cukup tipis hanya kira-kira 52 kali dengan nilai sekitar Rp879,9 juta.

Tak jauh beda dengan saham TAXI. Emiten ini pada Senin, sehari sebelum demo dibuka di angka Rp211 per lembar saham dan menguat sorenya sebesar 8,9 persen ke level Rp235. Tapi esoknya, saat demo berlangsung sempat dibuka angka Rp237 tapi kemudian menurun menjadi Rp235. Dan kemudian di Rabu, merosot ke Rp231 atau sempat melemah 1,17 persen. Meski begitu, di Rabu itu, perdagangan saham TAXI sempat ramai sekitar 2.889 kali atau kira-kira Rp18,6 miliar.

Namun pada akhirnya, kinerja kedua saham itu akan sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Jika nantinya kebijakan pemerintah itu berubah kembali dan lebih berpihak kepada perusahaan taksi online, maka kemungkinan besar akan menggerus kinerja sahamnya.

"Karena sejauh ini taksi online jadi pilihan masyarakat. Maka kinerja kedua emiten itu akan sangat



tergantung dari kebijakan pemerintah," tandas analis Dana Reksa Sekuritas, Lucky Bayu, belum lama ini.

Menurut dia, jika nantinya akan ada aksi demonstrasi lagi, maka tentu sangat memungkinkan para pelaku pasar melakukan aksi ambil untung (*profit taking*) dari kedua saham tersebut. Hal ini akan menimbulkan tergerusnya nilai saham-saham tersebut.

Karena dengan kinerja memerah dari kedua saham itu saat adanya aksi unjuk rasa itu membuktikan bahwa aksi itu memang jadi picu sentimen negatif di mata pelaku pasar. "Ini menandakan pelaku pasar tak menyukai aksi ini," cetus dia.

Sehingga, ke depan jangan sampai ada lagi aksi demonstrasi serupa, karena pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak, emiten

dan pelaku pasar yang mengoleksi kedua saham itu.

"Kuncinya, perlu ada ketegasan payung hukum dari pemerintah," pinta Lucky.

Soal aturan hukum, Sigit mengancam pemerintah yang tidak menerapkan prinsip yang sama kepada pelaku taksi online. Pasalnya selama ini, pihaknya sudah banyak diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, mulai dari penentuan tarif yang tak bisa diturunkan seenaknya, pengenaan pajak badan, uji kelayakan kendaraan (KIR) secara berkala, sampai diharuskan memiliki *pool*.

Tapi itu semua, ternyata tidak dilakukan oleh pelaku taksi online. Sehingga kemudian mereka dianggap taksi ilegal, bahkan kerap diuber-uber oleh pihak berwajib.

"Kami minta aturannya adil. *Fair*



play buat semua. Sehingga *playing field*-nya sama," cetus Sigit.

Jika pemerintah tidak tegas, kata dia, pemerintah sendiri yang telah menciptakan ketidakadilan itu. Salah satu aturan yang wajib ditaati oleh pelaku taksi online adalah UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disebutkan Sigit, berdasar UU itu penyelenggaraan angkutan umum wajib dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan, dilayani oleh kendaraan umum, dan dikemudikan oleh pengemudi yang memiliki SIM umum.

"Jika disebut kendaraan umum, maka harus menggunakan plat kuning dong. Apalagi selama ini, di mana *pool* mereka?" ketus dia.

Namun demikian, dirinya

memastikan pihak Blue Bird tidak pernah takut untuk bersaing. Bahkan sebagai bagian dari teknologi, pihak Burung Biru juga telah meluncurkan aplikasi pemesanan berbasis online sejak beberapa tahun yang lalu.

"Persaingan itu positif. Perseroan juga akan bergerak lebih maju dengan menciptakan inovasi dan meningkatkan pelayannya. Tapi, aturan mainnya harus adil terlebih dahulu," tandas Sigit.

Sejauh ini, diakuinya, sejak adanya taksi Uber beberapa tahun belakangan dan Grab Car belum lama ini, tentu telah berdampak pada kinerja perseroan. Namun, ia belum berani menyebutkan angka secara pasti dampak yang diterima dari adanya bisnis taksi online itu.

Respon Pemerintah Selesaikan Permasalahan Taksi Online

Adanya demonstrasi menentang beroperasinya taksi online yang malah berujung pada aksi vandalisme, tentu tak bisa dipandang remeh oleh pemerintah. Pihak regulator harus bergerak cepat untuk mengantisipasi dampak negatif selanjutnya.

Plt Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sugidardjo menandakan, sebelum adanya aksi demonstrasi itu, pihak Kemenhub sudah mengirimkan Surat Peringatan ke manajemen Uber dan Grab agar jangan beroperasi sebelum ada izin terlebih dahulu.

Namun, ternyata mereka tidak menggubrisnya hingga kemudian munculnya aksi demonstrasi pelarangan taksi ilegal itu beroperasi. Meski memang sudah didemo, hingga kini taksi ilegal itu tetap saja beroperasi. Karena sepintas susah diidentifikasi karena menggunakan plat hitam.

Menurut Sugidardjo, pemerintah sudah mengundang kedua pihak itu dan menanyakan ke mereka, mau menjadi perusahaan penyedia jasa IT atau sebagai perusahaan transportasi. Karena dengan pilihan itu, nantinya ada aturan-aturan terkait yang akan diikuti oleh mereka.

"Tapi jawaban mereka maunya

menjadi penyedia jasa IT. Kalau begitu tidak apa-apa mau menjadi penyedia jasa, yang penting harus *fair*," ingat dia.

Sikap *fair* yang dia maksud adalah, jika tetap menjadi penyedia jasa dan tetap seperti saat ini, maka mereka tidak bisa beroperasi selama belum bekerja sama dengan perusahaan taksi yang ada.

"Itu yang menjadi fokus pemerintah. Maka kami minta mereka harus kerja sama dengan pihak taksi konvensional yaitu perusahaan taksi yang legal," pinta pemerintah.

Untuk itu, pihaknya minta ke para pengusaha jangan hanya berusaha untuk mengambil untung semata, tapi melupakan aturan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah meminta ke pihak Uber atau Grab mesti melakukan pendaftaran armada yang dimiliki para pengemudinya, agar dari aspek penerimaan sektor pajaknya lebih jelas.

"Termasuk harus memenuhi uji KIR secara berkala, agar ada aspek keselamatan penumpangnya," ucap dia.

Sementara itu, selaku penjaga gawang masalah tata kelola sistem IT dan telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memastikan aplikasi Uner dan Grab Car jika tidak mematuhi aturan hingga 31 Mei 2016 akan diblokir.

Bahkan pemerintah juga sudah memastikan, hingga akhir Mei itu mereka berdua sudah berbandar hukum atau minimal bekerja dengan Perseroan Terbatas (PT), koperasi, maupun yayasan yang memiliki izin usaha transportasi.

"Jadi, hingga 31 Mei 2016 itu masa transisi. Setelah itu, seluruh regulasi transportasi harus dipenuhi," tegas Menkominfo, Rudiantara, akhir Maret ini.

Bahkan jika akhir Mei itu, mereka tidak mematuhi aturan, janji dia, dipastikan akan ada tindakan tegas.

"Nanti sektornya Pak Jonan (Menhub - Ignasius Jonan), eksekusinya di Pemda DKI. Dan Pak Menkopolkam yang jadi wasitnya. Saya hanya penjaga stadion, kalau disuruh tutup, akan kami tutup," kata Rudiantara beranalogi.

Ada Apa di Balik Banting Harga Taksi Online?

Ada satu fenomena menarik dari mencuatnya polemik taksi online itu. Salah satunya adalah soal harga yang ditawarkan taksi online lebih murah dari taksi konvensional. Sehingga secara otomatis, selain diaksesnya lebih mudah, masalah harga ini membuat taksi online jadi primadona.

Namun jika ditilik dari aspek berbisnis, banting harga ini relatif tidak wajar. Atau di luar kewajaran dalam aspek berusaha. Menurut pengamat transportasi, Darmaningtyas, agak aneh memang kalau bisnis taksi online seperti Uber dan Grab itu masih terus menerapkan harga bawah.

Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar. Karena, langkah subsidi tarif yang dilakukan kedua manajemen itu bisa jadi penyebabnya mereka disokong modal besar atau mungkin melakukan praktik lain, seperti kapitalisasi data pelanggan yang diolah untuk kepentingan mereka.

"Bisa jadi mereka selama ini melakukan kapitalisasi data pelanggan yang dijual ke pengusaha iklan. Sehingga bisa terus menyubsidi harga," tandas dia.

Hal ini memang mudah ditelusuri, sebab semua pemesanan taksi itu melalui online, maka semua data yang masuk sangat mudah diolah. Cuma masalahnya, kapitalisasi data itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Bukan kepentingan negara seperti yang terjadi di China. Di Negeri Tirai Bambu, Uber boleh beroperasi tapi data yang dikumpulkannya harus diserahkan ke negara.

Untuk itu, jika mau adil terjun di bisnis transportasi, maka harga yang ditawarkan juga harus wajar. Apalagi memang, segmen pasar Uber dan Grab sendiri, sama seperti segmennya penumpang taksi konvensional yaitu masyarakat kelas menengah.

Namun demikian, ia juga tidak menolak kalau di belakang Uber atau Grab itu ada pemodal besar. "Bisa saja begitu (ada pemodal besar) di belakangnya. Karena dengan terus disubsidi tentu menjadi aneh," tuding dia.



Grab, perusahaan asal Singapura dan milik warga Malaysia ini memang masuk ke Indonesia harus menggunakan skema *joint venture* dengan perusahaan asal Indonesia. Untuk itu, Grab telah menggandeng Lippo Group Indonesia dengan membentuk perusahaan venturanya, dengan nama PT Grab Taxi Indonesia.

Lippo sendiri masuk ke bisnis IT belum lama ini lewat MatahariMall yang disuntik US\$500 juta (Rp6,5 triliun). Nantinya dengan kerja sama ini, Grab akan menjadi moda untuk logistik MatahariMall yang menargetkan penjualan US\$1 miliar (Rp13,1 triliun) dalam 2-3 tahun ke depan.

Bahkan dengan kerja sama ini, pihak Grab mengklaim bahwa sayap bisnisnya, GrabCar, menguasai 50 persen dari pasar 'taksi pribadi' di Indonesia per akhir 2015 lalu.

Di Singapura, kantor pusatnya Grab, kepemilikan saham dari Grab Limited Singapura sebesar 99,92 persen dan 0,08 persen dari perusahaan di Malaysia. Bahkan daftar sebagai investor ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga sebagai investor IT bukan transportasi.

Sementara Uber berasal dari California, Amerika Serikat (AS) dengan membentuk perusahaan venturanya bernama PT Uber Technology Indonesia.

Pengamat IT, Rahman Mangussara juga menegaskan, faktor keadilan berbisnis dalam transportasi

taksi juga harus ada unsur keadilan. Termasuk tidak seenaknya menaikkan-turunkan harga atau tarifnya.

"Selama ini pelaku bisnis taksi online bisa naik-turunkan harga seenaknya, sementara pelaku konvensional tidak bisa seperti itu," tegas dia.

Untuk itu, Rahman menyarankan agar kedua-duanya, pelaku bisnis taksi online atau konvensional diatur dengan aturan yang sama. Cuma masalahnya, selama ini aturan yang ada relatif lebih lambat dari perkembangan teknologi.

"Jadi yang terpenting, pemerintah mau mengatur dengan baik. Sehingga pelaku transportasi online juga diatur sama dengan transportasi konvensional," cetus Rahman.

Soal harga juga kembali diingatkan oleh Sugidardjo. Menurutnya, pemerintah tetap mengingatkan pelaku transportasi online tidak mematok harga nawah seenaknya. Hal ini sama saja memonopoli harga di tingkat bawah.

"Karena jika berbisnis transportasi bukan hanya mematuhi UU LLAJ, tetapi juga ada aturan lain yang harus diikuti, UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. Jadi harga itu tetap harus berdasar harga pasar," jelas dia.

Selama ini, GrabCar atau Uber mematon tarif taksinya sekitar Rp3.000-Rp3.500 per kilo meter. Sementara taksi konvensional baik Blue Bird maupun Ekspres menarik Rp4.000 per km ditambah biaya buka pintu sebesar Rp7.500.

Dengan tarif begitu, maka tarif taksi online bisa lebih murah 25-30 persen ketimbang taksi konvensional. Mahalnya tarif taksi konvensional karena selama ini dipengaruhi oleh beban langsung, biaya operasional, margin keuntungan, dan pajak penghasilan. Sementara taksi online tidak terbebani hal itu.

Butuh Langkah Bijak

Sebagai bagian dari kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah dalam konteks ini memang harus bijak. Karena jangan sampai



Sejumlah karyawan bekerja di Kantor GO-JEK, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (1/3). Setelah diluncurkan pada Januari 2015, aplikasi GO-JEK kini sudah diunduh lebih dari 11 juta kali dan telah menggandeng 200 ribu pengemudi di seluruh Indonesia.

bisnis yang berbasis teknologi juga dimatikan tanpa ada solusi yang tepat.

Menurut pengamat digital economy, Fahmi Fahrudin, yang terpenting, pemerintah mau duduk bareng membahas dengan pelakunya, tanpa harus mematikan bisnisnya.

"Soalnya transportasi ini sudah menjadi *local demand*. Masyarakat yang membutuhkan transportasi itu. Jadi tidak bisa ditutup sepihak," tandas dia.

Apalagi, minat terhadap transportasi online ini cukup tinggi. Dilihat dari pengunggah aplikasi taksi online ini, animo publik ternyata tinggi. Untuk UberTaxi mencapai 50 juta, Grab Taxi/Grab Car sebanyak 5 juta, pengunggah aplikasi Gojek. Sementara aplikasi taksi konvensional, seperti aplikasi Bluebird, hanya

diunggah sebanyak 500 ribu.

Dan dalam waktu singkat, kata dia, UberTaxi sudah memiliki 16 ribu unit armada. Sedang GrabTaxi ada 6 ribu. Dan Gojek mencapai 200 ribu orang. "Ini jelas di luar prediksi," ucap dia.

Pelaku bisnis online, Naufal Firman Yursak juga meminta pemerintah untuk bergerak cepat menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai setelah ada kericuhan baru bergerak lagi.

"Pemerintah harus fokus mengatasi fenomena bisnis berbasis teknologi yang kian masif ini. Bahkan kalau perlu, bentuk lembaga khusus yang mengatur bisnis online ini, tidak hanya sekadar kementerian," terang Firman.

Apalagi selama ini, katanya, pasar Indonesia menjadi pasar media sosial yang masuk sebagai *captive market* yang besar.

Menurutnya, untuk pelaku internet saat ini mencapai 83 juta, yang mengakses Facebook sebanyak

69 juta, dan twitter sejumlah 45 juta. Jadi bisnis online begitu diminati.

"Dulu bisnis *door to door*, sekarang bisa via *smartphone*. Makanya kebijakan pemerintah jangan sampai ketinggalan," tukas dia.

Pihak PT Uber Technology Indonesia, mengaku akan mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia. Pihaknya berharap masalah ini cepat selesai, sehingga baik transportasi konvensional maupun berbasis online dapat berjalan bersamaan.

Menurut Komisaris Uber Indonesia, Donny Sutadi, pihaknya mengaku sedang mengurus izin operasi, mencari mitra kerja, masalah koperasi, dan lainnya. Tapi sejauh mana prosesnya, dia belum mau menyampaikan perkembangannya.

"Kami seakrang ingin kerja sama agar cepat selesai dan kembali ke normal, aman-aman saja, dan tidak adabtakut. Semua (pengemudi) bisa hasilkan uang untuk keluarga," tegas Donny. ■ *Busthomi*



Ramai-ramai Menolak Taksi Berbasis Aplikasi

Penolakan terhadap taksi berbasis aplikasi bukan cuma terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar dunia, seperti di Amerika, Eropa, dan Asia. Pemerintah setempat menerapkan kebijakan yang berbeda-beda terhadap taksi berbasis aplikasi.

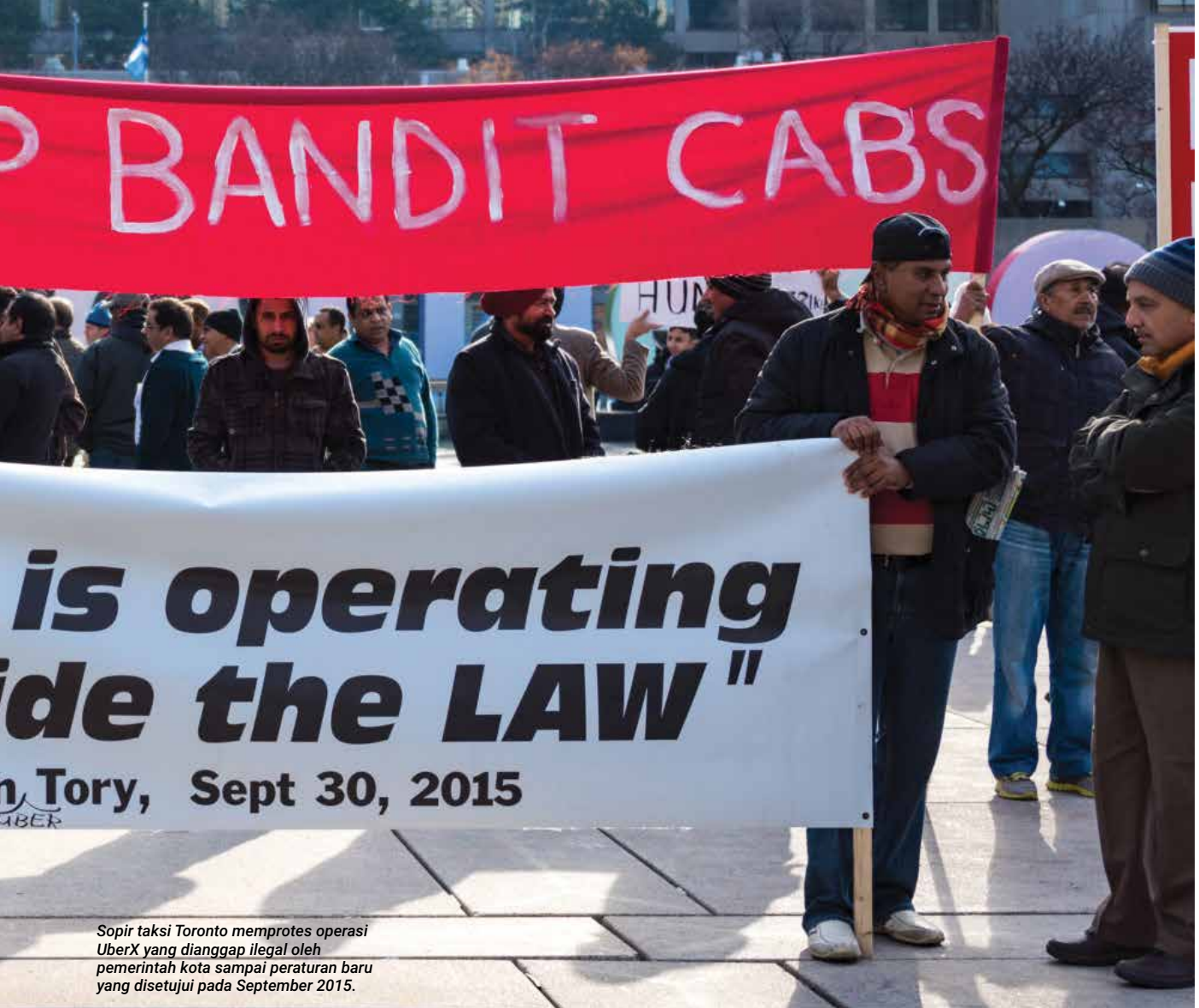
Kemajuan teknologi bisa menyelesaikan sejumlah masalah, namun ia juga memunculkan masalah-masalah baru. Pernyataan itu cocok dengan munculnya taksi

berbasis aplikasi di perkotaan. Taksi berbasis online telah memberikan layanan murah dan nyaman pada konsumen, tetapi juga ada dampak lain: pengemudi taksi reguler merasa dirugikan dan diperlakukan tidak

adil. Kalah bersaing, penghasilan pengemudi taksi reguler pun tergerus.

Mereka pun melakukan aksi protes massal yang menimbulkan kemacetan, bahkan menyeret-nyeret angkutan umum non-taksi, yang sebenarnya tidak terkait dengan sengketa ini. Fenomena penolakan terhadap layanan transportasi online, khususnya penolakan pengemudi taksi reguler terhadap taksi berbasis aplikasi seperti Uber, Grab, dan lain-lain, pertengahan Maret 2016 ini marak di Jakarta. Hal ini sebetulnya bukan cuma terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar di negara-negara lain.

Taksi berbasis aplikasi memang memiliki keunggulan dibandingkan



Sopir taksi Toronto memprotes operasi UberX yang dianggap ilegal oleh pemerintah kota sampai peraturan baru yang disetujui pada September 2015.

taksi reguler. Tarifnya lebih murah, dan tarif itu bisa dilihat sebelumnya pada aplikasi. Pada taksi reguler, tarifnya lebih mahal dan tergantung pada argometer. Taksi reguler memerlukan izin operasional, sedangkan taksi berbasis aplikasi tak butuh izin. Taksi reguler harus melakukan uji kir 6 bulan sekali, hal yang tak dituntut dari taksi berbasis aplikasi. Taksi reguler berpelat kuning dan membayar pajak, sedangkan taksi berbasis aplikasi berpelat hitam, sehingga tak perlu membayar pajak kendaraan umum.

Di bisnis taksi konvensional, konsumen bukan hanya harus membayar jasa angkutannya, tetapi secara tidak langsung juga mesti menanggung biaya kredit mobilnya,

gaji pegawai perusahaan taksinya, biaya listrik dan AC, dan sebagainya. Di bisnis taksi berbasis aplikasi, konsumen tidak ikut menanggung biaya-biaya tersebut. Jadi, tidak mengherankan jika tarifnya bisa jauh lebih murah. Namun benturan dengan pengemudi taksi reguler menjadi persoalan sosial, karena jumlah pengemudi ini banyak, dan pemerintah kota setempat dituntut harus memberi solusi.

Di Amerika Serikat, kebijakan di setiap negara bagian berbeda. Di New York, taksi berbasis aplikasi dilegalkan dengan syarat memakai pelat khusus yang sama dengan taksi reguler. Pengemudi mempunyai SIM khusus. Penumpang membayar dengan kartu kredit. Sedangkan

di Inggris, otoritas Transport of London membolehkan beroperasinya taksi berbasis aplikasi. Namun sebelumnya, Himpunan Pengemudi Taksi Berlisensi (Licensed Taxi Driver Association) menolak Uber tergolong sebagai taksi.

Dilarang di Jerman dan Belanda

Di Jerman, otoritas transportasi Berlin melarang beroperasinya taksi berbasis aplikasi, karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan angkutan umum. Pengadilan Frankfurt juga melarang Uber beroperasi karena dinilai sebagai perusahaan tidak resmi. Larangan senada muncul di Belanda. Pengadilan Belanda melarang beroperasinya taksi berbasis aplikasi,

Sejumlah pengemudi angkutan umum melakukan unjuk rasa di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (22/3). Dalam aksinya mereka menuntut untuk pemerintah segera menutup armada angkutan plat hitam berbasis aplikasi.

karena dinilai melanggar peraturan mengenai pengemudi.

Di Asia, Filipina membolehkan beroperasinya taksi berbasis aplikasi karena ada aturan yang sesuai dengan klasifikasi taksi berbasis aplikasi, yang bernama *Transportation Network Vehicle Service*. Sementara itu di Thailand, Departemen Transportasi Thailand memerintahkan Uber Technologies Corp, salah satu operator taksi berbasis aplikasi, menghentikan operasinya. Aturan di Thailand cukup keras. Pengemudi, yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan komersial, akan didenda.

Untuk bercerita lebih lanjut tentang pro-kontra taksi berbasis aplikasi di kota-kota luar negeri, ada baiknya kita belajar dari pengalaman Seoul. Seoul menjadi perbandingan yang menarik karena itu adalah kota besar di Asia, dan ibukota dari Korea Selatan, yang ingin tampil sebagai negara industri yang berbasis teknologi tinggi.

Bicara tentang aplikasi online, Korea Selatan adalah negara yang termasuk paling cepat sambungan internetnya. Negeri ini juga dikenal karena produk-produk dari perusahaan semacam Samsung dan LG Electronics, merek-merek yang sangat populer di Indonesia untuk produk smartphone dan alat-alat rumah tangga. Jadi penolakan terhadap taksi berbasis aplikasi di Seoul terasa “mencengangkan.”

Di Seoul, pemerintah setempat melarang taksi berbasis aplikasi karena dinilai tidak memberikan standar keamanan bagi penggunaannya. Taksi berbasis aplikasi yang dioperasikan Uber dianggap juga mengancam nafkah para pengemudi taksi reguler. Sebagai gantinya, pemerintah kota Seoul kemudian meluncurkan aplikasi sendiri berbasis



GPS (global positioning system). Sistem yang serupa ini menawarkan kenyamanan bertransportasi yang sama kepada warga kota Seoul, tanpa citra “predator” yang sebelumnya disematkan pada taksi Uber.

Investigasi oleh Polisi

Pemerintah kota Seoul, yang berembuk dengan organisasi-organisasi taksi lokal, mengeluarkan pernyataan berjudul “Tanggapan

Kuat Kota Seoul Terhadap Aplikasi Taksi Panggilan Illegal Uber.” Pernyataan itu mendesak warga untuk “melakukan penilaian yang masuk akal” dalam menggunakan layanan-layanan Uber, yang dikatakan telah melanggar sejumlah pasal Peraturan Keselamatan Penumpang tentang pelatihan sopir dan asuransi penumpang.

Pemerintah kota Seoul mengajukan keluhan ke polisi tentang



taksi berbasis aplikasi pada Mei 2015, kata pernyataan itu. Namun jaksa penuntut tidak melakukan tindakan lebih lanjut karena kurangnya bukti-bukti. Maka pemerintah kota Seoul meminta investigasi baru oleh polisi. Pemerintah kota mempertimbangkan opsi untuk menutup aplikasi-aplikasi *mobile* yang terkait Uber, dan mengusulkan sejumlah regulasi baru ke kementerian yang bersangkutan untuk melarang Uber.

Perwakilan Uber pun mengekspresikan kekecewaan berat terhadap tindakan otoritas kota Seoul, yang melarang Uber. Uber memberi reaksi dengan kata-kata keras, “Pernyataan yang dikeluarkan oleh Divisi Logistik dan Taksi Kota Seoul untuk menyerang Uber... menunjukkan betapa tidak pahamnya departemen ini dengan gerakan ‘kota cerdas’ (*smart city*).”

“Sementara pemimpin-pemimpin

global lainnya, termasuk London, Washington D.C., Singapura, dan Shanghai telah menyambut teknologi-teknologi pemikiran maju, komentar-komentar semacam (yang dikeluarkan otoritas Seoul) ini menunjukkan Seoul dalam bahaya tetap terperangkap di masa lalu, dan ketinggalan oleh gerakan global *sharing economy*,” ujar perwakilan Uber.

Ekspansi Global

Berbasis di San Francisco, Amerika Serikat, Uber sempat membuat ekspansi global sebagai prioritasnya yang baru. Itu dilakukan Uber sesudah serangkaian penggalangan pendanaan, yang memberi nilai pada perusahaan itu sebesar 17 miliar dollar AS. Namun, Uber menghadapi sejumlah perlawanan dari komisi-komisi taksi setempat, yang memandang keberadaan Uber sebagai ancaman eksistensial.

Para pengemudi taksi khususnya juga merasa kesal dengan pernyataan CEO Uber, Travis Kalanick, yang mengisyaratkan bahwa Uber pada akhirnya akan menggantikan semua taksi dengan kendaraan berpengemudi sendiri (*self-driving cars*). Uber sudah dilarang juga di beberapa kota di Eropa. Namun, letak ironinya adalah Uber juga dilarang di Seoul, yang dianggap mewakili kota bisnis berteknologi tinggi dan sistem futuristik, dengan infrastruktur *mobile phones* dan Internet terbaik.

Sesudah pertarungan usai dan tersingkir, Uber pelan-pelan mencoba membangun kembali, dengan bermitra bersama perusahaan-perusahaan lokal dan mengubah pemerintah setempat, yang awalnya bermusuhan menjadi kawan. Uber meluncurkan lagi layanan UberBlack yang melayani orang asing dan warga berkebutuhan khusus, kali ini dengan melibatkan keikutsertaan pemerintah. Meski skala bisnisnya lebih kecil, masih lebih baik berbisnis daripada kehilangan pasar sama sekali. ■ Satrio Arismunandar

Transportasi Berbasis Online, Kapitalisme Liberal Gaya Baru, Majikan Baru

Selagi penghidupan bertambah sukar, nafsu kepada partikularisme, mau hidup sendiri, bertambah melulu. Bukan penggabungan atau persatuan perekonomian yang dicari, melainkan persaingan dan perpecahan. Masing-masing mau hidup sendiri dan kaya sendiri. (Bung Hatta, Daulat Rakyat, 20 November 1933).

Dalam logika kapitalisme, perusahaan-perusahaan tidak pernah berkomitmen memenuhi kepentingan penyediaan pelayanan bagi para konsumen, melainkan semata demi kepentingan mengamankan keuntungan/laba sebanyak-banyaknya dan mengurai pasarjajah pasar seluas-luasnya. Dalam hal ini, Grab, Uber maupun Gojek, harus dibaca dalam perspektif seperti itu.

Bagaimana gambaran sesungguhnya bahwa fenomena transportasi online ini sejatinya merupakan hajatan para kapitalis besar asing maupun dalam negeri? Inilah sekelumit kisah betapa para pengemudi berbasis online pun sejatinya hanya korban para kapitalis dan beberapa korporasi. Sehingga nasibnya sebenarnya tidak lebih bagus dibandingkan para pengemudi reguler.

Mari kita telisik anatomi para pelaku kunci dari transportasi online sehingga mengundang aksi unjuk rasa para pengemudi taksi reguler beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim riset Aktual, Grab yang basisnya di Singapura baru-baru ini telah menjalin kerjasama strategis dengan Lippo Group Indonesia. Lippo masuk ke bisnis IT sejak tahun lalu lewat MatahariMall yang disuntik US\$500 juta (Rp6,5 triliun). Pada perkembangannya nanti, Grab

akan menjadi moda untuk logistik MatahariMall yang menargetkan penjualan US\$1 miliar (Rp13,1 triliun) dalam 2-3 tahun ke depan. Grab mengklaim bahwa sayap bisnisnya, GrabCar, menguasai 50% dari pasar "taksi pribadi" di Indonesia per akhir 2015.

Grab, yang juga disokong oleh investor Didi Kuaidi dari China, GGV Capital, dan SoftBank, saat ini valuasinya ditaksir US\$1 miliar (Rp13,1 triliun).

Lantas, bagaimana halnya dengan Uber, perusahaan pesaing Grab? Uber. Ujung-ujungnya adalah IPO, sehingga bisa melantai di pasar saham. Didirikan 2009 oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp, basisnya di San Fransisco. Sekarang ada di 300-an kota di 68 negara.

Menurut Price Waterhouse Coopers, per 2025 valuasinya ditaksir US\$335 miliar (Rp4.407 triliun). Adapun pendapatan Uber diperoleh dari *fee* transaksi 20% dari setiap *booking*. Informasinya, per akhir 2015, nilai kotor *booking* diperkirakan mencapai US\$10,84 miliar (Rp142,6 triliun).

Komisi 20% berarti sekitar US\$2 miliar (Rp26,3 triliun). Tahun ini, diproyeksikan nilai *booking*-nya US\$26,12 miliar (Rp343,6 triliun) atau pendapatan dari komisi mencapai US\$5,2 miliar (Rp68,4 triliun).

Sekarang, marilah kita teropong Gojek. Gojek. Ini jelas Northstar



Warga melihat dari dekat supercar Lamborghini ketika peluncuran layanan aplikasi GrabCar di Jakarta, Rabu (21/10).

Group via NSI Ventures. Sudah berbadan hukum Indonesia yakni PT Gojek Indonesia. Menurut Bareksa.com, Northstar menyuntik dana US\$200 juta (Rp480 miliar) secara bertahap buat Gojek.

Sementara itu pesaingnya,



GrabBike via PT Metro Asia Pasific yang induknya di Malaysia, dapat suntikan US\$350 juta (Rp490 miliar) dari Coateu Management LLC dan China Investment Corporation (CIC).

Namun, di balik taksi regular pun, juga bercokol para kapitalis besar yang tidak kalah ekspansif dibandingkan pesaing pendatang barunya, para pemilik transportasi online. Mari kita mulai dengan

membedah taksi Express.

Taksi Express yang pemiliknya adalah Peter Sondakh melalui PT Rajawali Corpora, tahun lalu sempat dilirik mau dibeli oleh Saratoga (Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya) tapi batal. *Revenue* (TTM) Rp971 miliar dan *net income* (TTM) Rp20 miliar. Total asetnya (Q) Rp2,9 triliun. Nilai kapitalisasi pasar saham Taksi di bursa adalah

Rp519 miliar. Saat ini diperkirakan sahamnya melonjak 9 poin jadi Rp242/lembar.

Adapun Blue Bird, pemegang saham terbesarnya adalah PT Pusaka Citra Djokosoetono (37,17%). Salah satu komisaris independennya adalah Prof. Hikmahanto Juwana (UI). Kapitalisasi pasarnya di bursa Rp16 triliun. Total asetnya (Q) Rp6 triliun. *Net income* (TTM) Rp823

Supir taksi Express melakukan aksi demo menolak keberadaan angkutan umum online di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3).

miliar. Pendapatan (TTM) Rp5,3 triliun (kebanyakan dari pelanggan korporat).

Melalui gambaran selintas tadi, bukankah para para pengemudi berbasis online maupun regular sejatinya sama-sama jadi “sapi perah” para kapitalis? Sepertinya memang begitu.

Mari sejenak kita buat peta perbandingannya. Katakanlah, perusahaan taksi di Jakarta mematok keuntungan minimal Rp 200.000,00 bersih per hari per taksi. Jadi, per bulan sebuah taksi menghasilkan Rp 6 juta.

Sementara perusahaan taksi membayar cicilan taksi ke bank sekitar Rp 3 juta per bulan selama 5 tahun karena taksi dianggap telah tua. Dalam lima tahun itu keuntungan perusahaan taksi mencapai angka minimal Rp 3 juta x 12 x 5 = Rp 180 juta per taksi. Plus mobil bekas taksi dijual seharga Rp 75 juta. Jadi penghasilannya adalah Rp 180 juta ditambah Rp 75 juta menjadi Rp 255 juta per taksi bersih. Maka bisa dibayangkan perusahaan taksi dengan armada 50.000 taksi di Jakarta akan menghasilkan keuntungan Rp 11 triliun 250 miliar.

Bagaimana dengan para supir taksinya? Sementara untuk supir rata-rata penghasilan per bulan setara dengan Rp 3 juta dengan hari kerja antara 18 sampai 23 hari per bulan. Selama masa kerja taksi 5 tahun, penghasilan sopir taksi sekitar Rp 180 juta. Suatu angka pendapatan minimal kebutuhan khas kelas buruh di Indonesia. Perimbangan yang sama sekali tidak adil antara pendapatan perusahaan taksi dan sopir taksi alias buruh.

Bedanya, kalau para supir taksi regular benar-benar sebagai buruh yang bermodalkan tenaga dan ketrampilannya, maka para pengemudi transportasi berbasis online malah justru dengan sadar masuk mendukung skema



kapitalisme liberal. Meskipun imbalan materinya relatif berimbang. Namun tetap saja, hakikinya menjadi bagian integral dari praktek kapitalisme liberal dan persaingan bebas.

Yang lebih krusial lagi, para kapitalis transportasi berbasis online berhasil menghindari kewajiban membayar pajak dari bisnis angkutan online tersebut. Sekadar gambaran riilnya, pemerintah Indonesia dengan begitu tidak bisa menarik keuntungan pajak dari iklan sebesar Rp 6 triliun per tahun di Indonesia dari iklan layanan online di youtube dan facebook.

Inilah bentuk kapitalisme dan liberalism gaya baru. Dengan para kapitalis sebagai majikan baru melalui penguasaan mereka di

ranah inovasi aplikasi online. Para pengemudi transportasi berbasis online yang sejatinya merupakan buruh kontrakan alias buruh lepas, ditanamkan kesan pada mereka seakan-akan mereka adalah para pemodal yang bergabung dengan para pemodal. Padahal para pengemudi transportasi online tersebut hanyalah para pemodal semu.

Yang jelas, untuk jangka pendek ini, para pengemudi transportasi regular memang pihak yang paling dirugikan. Karena perolehan pendapatan dari taksi regular tersebut berkurang hingga 50 persen. Dengan tak ayal, para pengemudi regular sebagai buruh, kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan ala kadarnya sebagai buruh.



Bukan itu saja. Pendapatan pemerintah dari pajak angkutan umum taksi juga tidak terpenuhi. Kemudian secara efek berantai, akan mengakibatkan bangkrutnya metro mini, angkot, dan Kopaja, menyusul beralihnya lapisan masyarakat menengah ke bawah sebagai pengguna gojek, grabbike, uber taksi dan sebagainya yang berbasis online.

Ini pada perkembangannya memang menyentuh satu isu strategis dalam perekonomian kita, yaitu keadilan sosial.

Wartawati senior Indonesia Nina Musolini Hanson, yang sekarang bermukim di Swedia, baru-baru ini berbagi cerita yang cukup menarik. Bahwa pengadilan tinggi Swedia telah memutuskan bahwa seorang pengemudi taksi di Stockholm

bersalah karena menarik Uber Taksi. Karena Taksi Uber adalah ilegal dan melanggar Peraturan Pertaksian.

Pengadilan memutuskan tersangka harus membayar denda 50 hari/200 kronor. Sang pria mengaku bahwa dia tidak memahami sistem/peraturan tentang bisnis taksi. Namun pengadilan tetap beranggapan, hal itu tidak berarti dia tidak bisa dijerat hukuman/tidak bertanggung jawab.

Moral dari kisah yang disampaikan Nina nampaknya jelas. Betapa Swedia yang sosialisme demokrasi dan keadilan sosial bukan sekadar ideologi partai melainkan sudah tertanam sebagai pandangan hidup atau *way of life* masyarakat Swedia, ketika ada kekuatan kapitalis yang dirasa bermaksud mengorbankan keadilan masyarakat khususnya kaum ekonomi lemah, maka negara hadir untuk membelanya. Dalam kasus ini, sanksi hukum terhadap pengemudi Uber Taksi Swedia merupakan wujud dari pembelaan negara terhadap kaum ekonomi lemah yang coba dirusak tatanannya oleh Uber Taksi.

Sedangkan di negeri kita yang mengklaim sebagai negara Pancasila yang berkomitmen menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara sama sekali tidak hadir membela kaum ekonomi lemah.

Yang mengemuka menyusul kontroversi transportasi berbasis online versus regular, justru sebuah pandangan pemerintah yang diwakili melalui sosok Rhenald Khasali, yang nampak jelas sangat pro kapitalisme liberal, ketika menjabarkan pandangannya di acara Indonesia Lawyers Club(ILC) TV One.

Jika alur pikirnya kita singkat-padatkan secara ekstrim dan tanpa basa-basi, kira-kira seperti ini: Atas nama modernisasi dan perkembangan teknologi, rakyat harus siap jadi korban perubahan. Padahal kenyataan yang sesungguhnya, baik para pengemudi taksi regular maupun berbasis online, saat ini sama-sama jadi korban kaum kapitalis. Hanya kebetulan saja,

yang sekarang diuntungkan dari segi materi adalah para pengemudi transportasi berbasis online seperti gojek, uber taksi dan sebagainya.

Lepas dari kenyataan bahwa yang satu diuntungkan secara material dan yang satunya merasa dirugikan, kalau dalam istilah Karl Marx, keduanya justru masuk perangkap Proletarisasi dari kelas sosialnya.

Artinya, memosisikan dirinya sebagai alat produksi dari kekuatan kapital, bukannya sebagai pelaku ekonomi yang mendayagunakan modal yang melekat pada dirinya.

Fakta bahwa beberapa pengemudi transportasi berbasis online memang punya kendaraan sendiri, namun pada perkembangannya modalitasnya itu justru bukan dikembangkan untuk perluasan kekuatan usahanya, melainkan malah dia abdikan untuk kepentingan kekuatan modal yang kebetulan bergerak di bidang teknologi informasi.

Ada benarnya memang, *feedback*-nya secara material jauh lebih besar dibandingkan pengemudi taksi regular. Namun jika dibandingkan keuntungan material dari pemilik gadget dan android untuk aplikasi yang digunakan para konsumen, sebenarnya dari sisi keadilan tetap saja eksploitatif.

Ironisnya, melalui kontroversi regular versus online di sektor transportasi, yang terjadi kemudian antar pengemudi online versus regular seakan telah terjadi konflik antar kelas ekonomi yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Padahal keduanya sejatinya masih tetap sebagai buruh yang amat tergantung pada majikannya, dan amat rentan untuk dieksploitasi para kapitalis.

Kalau para supir taksi Uber maupun Blue Bird/Expres memahami ideologi Marhaenisme, harusnya malah kompak, mencari cara agar saling menguatkan, menghadapi para kapitalis besar. Bukan kekompatan sebagai buruh yang sama-sama tak berdaya, tapi justru tampil sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan setara, menghadapi kaum kapitalis. ■

Hendrajit

Setengah Tahun KPK Berkutat di Kasus Sumber Waras

Akhir September 2015, tepatnya tanggal 28 September, lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menandatangani surat perintah dimulainya penyelidikan kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras. Tapi, hingga tahun 2016 berjalan tiga bulan, KPK mengaku belum menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. Artinya, Agus Rahardjo Cs belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk bahwa terjadi praktik tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut.

“Belum ada perkembangan baru tuh,” singkat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi Aktual.com, Selasa 29 Maret 2016. Mantan Staf Ahli Kepala BIN itu menekankan jika penanganan kasus tersebut berjalan dengan lancar. Tapi ganjilnya, KPK sendiri mengakui belum bisa menjerat satu pihak pun dalam kasus tersebut.

“Nggak ada kendala. Sejauh ini belum ada (pihak yang terindikasi korupsi),” beber dia

Geliat masyarakat yang meyakini adanya praktik korupsi dalam pembelian itu pun semakin menggebu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menjadi organisasi pertama yang berani mempertanyakan bagaimana penanganan kasus pembelian RS Sumber Waras, dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ada beberapa hal yang menurut



Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Tangkap Ahok melakukan aksi teatrikal ruwat di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3). Mereka meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembelian Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

MAKI menjadi pintu masuk untuk menguak bagaimana pola korupsi pembelian tanah RS Sumber Waras. Poin pentingnya, pertama soal proses administrasi dan teknis pengadaan, evaluasi Kementerian Dalam Negeri Nomor 903-3717/2014 tertanggal 22 September 2014 serta SK Tim Kajian Pembelian Tanah.

Keyakinan MAKI itu memang sejalan dengan hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit negara itu sejatinya mempermasalahkan soal penentuan

harga NJOP. Dalam auditnya disebutkan bahwa Pemprov DKI membeli tanah RS Sumber Waras bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2878, yang terletak di jalan Tomang Utara, dengan menggunakan NJOP jalan Kyai Tapa. Padahal NJOP seharga Rp 20.755.000 itu, merupakan harga tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Perhimpunan Sosial Chandra Naya.

Kedua adalah mengenai evaluasi Kemendagri terhadap pengadaan lahan RS Sumber Waras pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2014. Dalam evaluasi yang sempat ‘dipelintir’ oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama itu, mempertanyakan mengapa dan pembelian lahan itu tidak dianggarkan pada APBD 2014. Alasannya,



Agus Rahadjo

Alexander Marwata

Kemendagri takut Pemprov DKI tidak memiliki waktu yang cukup, untuk melakukan kajian terhadap tanah yang pembelannya teralokasi dana sebesar Rp 800.000.000.000 miliar itu.

Ketakutan Kemendagri sangat beralasan. Dengan merujuk sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan itu, pengadaan tanah untuk kepentingan umum didahului dengan berbagai kajian.

Nah, terkait ketakutan ini, sebelumnya sudah dibantah oleh pemprov DKI. Gubernur DKI yang dikerap disapa Ahok itu sempat menyatakan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 121,

yang merupakan perubahan atas Perpres sebelumnya. Dimana dalam Pasal 121 tertuang pemaparan soal proses pengadaan, tanah yang luasnya kurang dari lima hektare bisa dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah.

Perubahan atas Perpres 71 ini dijadikan senjata utama oleh Pemprov DKI untuk menepis audit BPK. Penghuni Balai Kota itu yakin bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras tidak perlu dibarengi dengan kajian yang komprehensif, sebagaimana perintah Perpres Nomor 71.

Tapi hal itu tidak senada dengan apa yang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji. Perubahan aturan termasuk Pasal dalam sebuah Perpres, bukan berarti menghilangkan pasal-pasal di atasnya.

“Seharusnya tidak diartikan demikian (menghilangkan pasal di atasnya). Biasanya pencabutan pasal itu tidak menghilangkan makna keterkaitan antara pasal-nya kan,” papar eks Wakil Ketua KPK itu, Rabu 30 Maret 2016.

Apa yang disampaikan Indriyanto juga kontrakdiktif dengan pernyataan dari pimpinan KPK yang sekarang tengah menjabat. Alexander Marwata menyebut ada perbedaan aturan soal pengadaan tanah yang dipakai Pemprov dengan BPK.

“Apakah betul audit BPK pengadaan tanah di atas satu hektare dengan membentuk panitia, ternyata di Perpres baru 2014 syaratnya dinaikkan jadi lima hektare, baru dibentuk panitia? Ada perbedaan peraturan di BPK, hal-hal itu yang akan dikaji,” kata Alex saat berbincang dengan wartawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa 29 Maret 2016.

Terakhir soal SK Tim Kajian, yang menampilkan kerancuan prinsip Pemprov DKI dalam membeli lahan RS Sumber Waras. Kalau pemprov DKI meyakini pembelian lahan tersebut tidak perlu diimbangi dengan kajian mendalam, mengapa ada Tim Kajian?

Keberadaan tim ini juga dianggap sebagai ‘mens rea’ korupsi di pengadaan lahan seluas 3,6 hektare ini. MAKI mengaku punya bukti kuat akan hal itu. SK tim tersebut diamini mereka tidak berlaku surut, sementara bukti yang mereka pegang menampakkan bahwa SK tim itu baru disahkan saat Pemprov DKI mentrasfer biaya pembelian lahan RS Sumber Waras.

Lantas bagaimana sikap KPK menanggapi berbagai permasalahan RS Sumber Waras ini. Agus Rahadjo Cs menegaskan tidak mau gegabah menaikkan status kasus ini ke tahap Penyidikan. Kita hanya bisa menunggu apakah KPK setuju dengan audit khusus yang dilakukan BPK. ■ M. Zhakcy-Wisnu Yusep

KPK Tetapkan Mantan Rektor Unair Jadi Tersangka



Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengumumkan penetapan tersangka untuk mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fasihul Lisan (FAS). Dia dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit pendidikan di Unair.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, status itu disematkan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap pengembangan RS kesehatan Unair, yang kemudian ditemukan 2 alat bukti.

“KPK menetapkan mantan Rektor Unair dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi RS kesehatan Unair, sumber DIPA 2007-2010 dan dugaan peningkatan sarana prasarana RS yang sama, sumber DIPA 2009,” papar dia di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3).

Lebih lanjut disampaikan Yuyuk, bahwa penyidik juga telah memperkirakan kerugian keuangan negara, yang diakibatkan oleh korupsi tersebut.

“Kerugian negara sekitar Rp 85 miliar, dari total nilai proyek kurang lebih Rp 300 miliar,” jelasnya.

Atas dugaan tersebut, penyidik menjerat Fasihul dengan hukuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah kedalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. /Nebby

Kepala BNN: Indonesia Bidikan Jaringan Narkoba Dunia



Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso mengatakan saat ini jaringan narkoba dunia membidik Indonesia sebagai pangsa pasar utama.

Terlebih, Indonesia memiliki jumlah penduduk produktif cukup banyak dan kehidupan sosial masyarakat yang terbelah bisa menerima.

“Sabu dunia ini asalnya dari Tiongkok, Taiwan, Pakistan, dan sejumlah negara Eropa, semuanya lari ke Indonesia. Bahkan yang di Australia juga pintu masuknya dari Bali dan Yogyakarta,” kata Budi Waseso di Palembang, Selasa (29/3).

Dia mengatakan berdasarkan peta jalur perdagangan narkoba milik BNN, diketahui bahwa sabu-sabu itu selalu transit di Malaysia dan Singapura. Kemudian, barang haram itu masuk ke Indonesia melalui sejumlah pelabuhan tikus.

“Indonesia ini negara kepulauan, dan di sinilah celahnya sehingga sulit sekali memberantas dari sisi suplai. Celaknya, ketika barang masuk pelabuhan tikus, warga yang mengetahui cenderung mendingkan saja, atau tidak melaporkan.”

Belum lama ini, BNN membekuk jaringan narkoba dunia asal Afrika yang masuk ke Indonesia melalui

pelabuhan tikus di Aceh dan Medan.

Sementara itu, diketahui bahwa dalangnya berada di Malaysia dan Singapura. Terkait ini, apakah ada dugaan bahwa negara tetangga turut memuluskan narkoba masuk ke Indonesia, Buwas mengatakan hingga kini belum ada bukti.

“Sejauh ini Indonesia masih berpikir positif karena narkoba ini sudah disepakati seluruh negara di dunia sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi bersama.”

Hanya saja, dia tidak menampilkan dugaan pemerintah Indonesia mengenai adanya suatu desain besar yang ingin menghancurkan generasi muda Indonesia.

“Setiap Warga Negara Asing yang tertangkap selalu negatif jika dites urine, berbeda dengan bandar asal Indonesia yang pasti positif. Ini menunjukkan bahwa pengedar narkoba ini benar-benar ingin merusak generasi muda Indonesia, jika bisa menghilangkan satu generasi.”

Berdasarkan data BNN, terdapat 40-50 orang meninggal setiap hari karena ketergantungan dengan narkoba. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah menyatakan negara dalam darurat narkoba dengan jumlah pengguna aktif mencapai lima juta orang. /Wisnu Yusep

KPK Segera Jerat Kajati DKI dalam Suap PT Brantas

Komisi Pemberantasan Korupsi mengindikasikan bakal segera menjerat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dalam kasus hadiah atau janji, yang berkaitan dengan penghentian penanganan perkara pada PT Brantas Abipraya.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif memaparkan, bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun konstruksi hukum untuk menjerumuskan anak buah HM Prasetyo itu.

“Sedang dipikirkan konstruksinya, setelah periksa saksi-saksi. Belum selesai, masih didalami dan dipelajari fakta-faktanya,” ujar Syarif kepada wartawan, Selasa (5/4).

Syarief pun mengungkapkan, pihaknya sudah mengantongi bukti yang kuat untuk menjerat kedua pejabat Korps Adhyaksa itu. “(Faktanya) kuat, sabar aja,” kata Legtor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu.

Dalam kasus percobaan suap PT Brantas ini, KPK telah menjerat pihak pemberi yakni Sudi Wantoko selaku Direktur Keuangan PT BA dan Dandung Pamularno sebagai Senior Manager PT BA. Dan pihak swasta selaku penerima bernama Marudut. /Wisnu Yusep



Soal Penertiban Transportasi Online, Pakar: Tak Perlu Revisi UU LLAJ



Pakar transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menegaskan Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tak perlu direvisi.

“Aplikasi teknologi di sektor transportasi bukan hal baru, termasuk sistem ‘online’. Mengenai pengembangan teknologi sudah ada dalam UU LLAJ. Ngapain harus direvisi,” katanya di Semarang, Sabtu (26/3).

Menurut dia, sistem daring (online) sudah diterapkan dalam perkeretaapian, seperti pemesanan tiket, kemudian teknologi juga digunakan untuk melacak lokasi kereta api (KA) sehingga teknologi bukan barang baru.

Namun, kata Kepala Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata itu, pengaplikasian teknologi dalam sektor transportasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus menaati aturan.

“Contohnya, taksi. Sudah diatur syarat-syaratnya apa saja, seperti harus punya lahan pengendapan kendaraan atau pool. Di pool, kelaikan kendaraan diperiksa setiap hari sebelum berangkat,” katanya.

Kendaraan yang dioperasikan,

kata dia, harus pula diuji kir setiap enam bulan sekali dan pengemudinya juga harus memenuhi kualifikasi, seperti kepemilikan SIM A Umum dan ada pengaturan waktu kerja.

“Taksi Uber dan Grab boleh saja, tetapi harus memenuhi aturan. Usaha yang dijalankan dalam bidang aplikasi atau transportasi? Kalau transportasi, ya, harus memenuhi aturan yang ditetapkan,” katanya.

Usaha transportasi, kata dia, menyangkut nyawa orang sehingga harus memenuhi aturan keselamatan, berbeda jika hanya melakukan usaha di bidang aplikasi yang tidak berhubungan dengan bidang transportasi.

Djoko mengakui penyedia jasa transportasi daring seperti Uber dan Grab mematok tarif lebih murah dibanding taksi konvensional karena tidak melalui proses yang ditempuh pengusaha angkutan pelat kuning.



“Tidak perlu punya pool, membayar pajak, dan sebagainya. Ini persoalannya. Seharusnya, Uber dan Grab ini harus melalui proses ini. Makanya, bukan UU-nya direvisi, namun aturannya yang harus ditegakkan,” katanya.

Transportasi umum, kata dia, memang semestinya didorong agar tidak gagap teknologi sehingga aplikasi digunakan untuk memudahkan penggunaannya, tetapi harus tetap menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

“Sebab, negara berhak melindungi setiap warga negaranya dalam bertransportasi dengan selamat, aman, dan nyaman,” pungkasnya. /Arbie Marwan



Hapus Semua Subsidi Energi, Menteri Sudirman Berniat Langgar UUD 1945

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menuding rakyat tidak berhemat dan boros dalam menggunakan energi, layak untuk dipertanyakan. Pernyataan itu keluar lantaran Sudirman melihat persoalan energi dengan “kaca mata kuda”.

Harus diakui memang konsumsi BBM selama sepuluh tahun terakhir mencapai rata-rata di atas 6 persen per tahun. Laju ini termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang rata-rata hanya mencapai sekitar 1 persen per tahun dan dunia sekitar 1,8 persen per tahun.

Sangat wajar jika persoalan ini menghantui pikiran Sudirman, mengingat tingkat produksi Minyak

dan Gas Bumi Indonesia yang terus menukik. Setelah Indonesia merdeka, puncak produksi minyak (peak oil) hanya terjadi 2 kali, pada tahun 1977 dan 1995 yang masing-masing sebesar 1,68 juta barrel oil per day (bpd) dan 1,62 juta bpd.

Setelah tahun 1995, produksi minyak Indonesia rata-rata menurun dengan *natural decline rate* sekitar 12%. Pada tahun 2014, produksi minyak bumi hanya sekitar 789 ribu bpd atau menurun menjadi 96 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 824 ribu bpd.

Memang, ketersediaan sumber energi dari bahan bakar fosil merupakan suatu keniscayaan akan habis. Dalam draf Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberdaya

Mineral 2015-2019 menyatakan cadangan terbukti minyak bumi tahun 2014 hanya sebesar 3,6 miliar barel, maka akan habis sekitar 12 tahun mendatang. Sedangkan gas bumi hanya sebesar 100,3 TCF dan akan bertahan selama 34 tahun jika tidak ada temuan baru.

Sedangkan untuk Batubara, berdasarkan data Badan Geologi KESDM tahun 2013 jumlah sumber daya batubara tercatat sebesar 120 miliar ton dan cadangan 31 miliar ton atau 26 persen dari jumlah sumber daya. Bila asumsi bahwa nilai produksi setiap tahun sekitar 435 juta ton, tanpa adanya temuan cadangan baru, maka secara ekonomis umur pengusahaan batubara hanya bertahan 72 tahun.

“Kondisi sekarang minyak sudah jelas impor dan gas tahun 2020 kita akan impor, kalau kita tidak berbuat apa-apa, bahkan batubara dalam 60 tahun mendatang akan habis,” tutur Sudirman dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jum’at (18/3).

Cara berpikir Sudirman dalam upaya melakukan efisiensi atau penghematan patut dipersoalkan. Sudirman menginginkan subsidi energi dicabut dan dengan sengaja membiarkan harga energi mahal, agar masyarakat merasakan pahit getirnya untuk mendapatkan energi. Dengan begitu dia berharap terjadi efisiensi dari masyarakat lantaran masyarakat merasa susah dan mahalnya untuk menikmati energi.

“Selama harga belum harga riil, masih disubsidi, masih digendong oleh negara, maka penggunaan energi tidak bisa hemat karena belum terasa membeli dengan harga riil, harga sesungguhnya,” tutur Sudirman.

Menanggapi hal itu, Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Mohammad Reza Hafiz menyayangkan pernyataan Sudirman. Menurut Reza, pencabutan subsidi energi menghilangkan peran dan tanggungjawab negara kepada rakyat serta membuktikan bahwa Nawacita hanyalah slogan tiada makna.

“Sangat disayangkan jika pemerintah mencari jalan pintas begitu saja dengan mencabut subsidi. Sepakat bahwa hadirnya negara tidak dapat dipungkiri terwakili oleh adanya subsidi energi bagi masyarakat. Atas dasar itu pula, kedaulatan energi yang digaungkan oleh Nawacita secara konsep sudah gagal. Masak semuanya mau dilempar ke pasar, Neolib banget,” tatar Reza kepada Aktual.com, Senin (21/3).

Tingginya konsumsi energi tidak sepenuhnya bermakna negatif dan mengambanghitamkan rakyat. Sudirman tidak melihat pertimbangan logis sebagai tuntutan dari pertumbuhan ekonomi dan memacu tingkat produksi.

Jika subsidi dicabut maka akan berimbas kepada biaya produksi yang tinggi dan menurunnya daya kompetitif dari persaingan global.

Oleh karena itu, Reza meminta pemerintah tidak melakukan kesewenang-wenangan atas energi, karena energi merupakan sendi

vital bagi negara, dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan psikologi rakyat yang terus-menerus menghadapi tekanan kesulitan berkepanjangan.

“Saya setuju, dengan konsep penghematan energi fosil terutama karena energi tersebut *non-renewable*. Tapi pemerintah jangan seenaknya lah mau cabut subsidi seperti itu, psikologis masyarakat dan dampak sosial yang ditimbulkan harus dipertimbangkan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan, jika memang subsidi energi fosil dicabut, sejauh mana perkembangan energi alternatif atau Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mampu disediakan oleh pemerintah.

Tak hanya Reza, ketersinggungan juga datang dari Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi atas tuduhan Menteri Sudirman. Selaku rakyat, Uchok merasa terganggu atas haknya untuk mendapatkan energi yang terjangkau dan seakan disudutkan lantaran besarnya penggunaan energi dalam negeri.

Lebih lanjut menurut Uchok, Sikap Sudirman bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal ini menegaskan bahwa negara tidak boleh melepaskan begitu saja pengelolaan kekayaan alam kepada mekanisme pasar. Karena jika subsidi energi dicabut, maka sama saja melepaskan hak kedaulatan negara terhadap hajat hidup orang banyak.

“Menteri Sudirman memang tidak hapal dan lupa perintah UUD 45 pasal 33 ayat 3 ini. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sekarang, melalui pemerintah memberikan pada perusahaan-perusahaan, akibatnya pejabat negara pada kaya raya, dan perutnya pada gendut-gendut dan rakyat sebagai pemilik saham negara

ini pada miskin,” katanya kepada Aktual.com Senin (21/3).

Senada dengan Uchok, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman turut menyayangkan atas tuduhan Menteri Sudirman Said terhadap rakyat.

Menurut Yusri, jika pemerintah ingin melakukan efisiensi energi, seharusnya dimulai dari internal pemerintah yang memberi bukti bahwa penyelenggaraan energi dikelola dengan jujur, sehingga menumbuhkan keteladanan dan kepercayaan bagi masyarakat untuk mengikuti setiap arahan dari pemerintah.

“Proses efisiensi harus dimulai dicontohkan dari sektor energi lebih dahulu seperti di PLN, Pertamina dan PGN dan di Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, SKK Migas dari dugaan kongkalikong pada setiap aktifitas kegiatan proyeknya,” kata Yusri kepada Aktual.com, Selasa (22/3).

Yusri menambahkan, ancaman pencabutan subsidi oleh Sudirman kepada rakyat merupakan tindakan keliru dan tidak sesuai keinginan Undang-Undang Dasar. Untuk keberhasilan efisiensi energi, dia menyarankan agar Sudirman membuktikan integritasnya kepada publik.

“Rakyat itu sangat mudah mengikuti dan taat terhadap semua kebijakan yang baik apabila pejabat itu bisa menunjukkan integritasnya tinggi dan transparan pada setiap kebijakannya.

Janganlah diperlihatkan contoh buruk seperti perlakuan Pemerintah dalam hal kasus PT Freeport Indonesia yang sudah secara jelas dan nyata tidak taat terhadap isi UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan bahkan terhadap isi Kontrak Karya tersebut. Akan tetapi kenapa Pemerintah tetap tunduk dan lemah terhadap kemauannya perusahaan asing, sehingga hal hal tersebutlah yang membuat rakyat apatis pada setiap omongan rencana Pemerintah,” pungkas Yusri. ■ Dadang Sah

Rakyat Dibohongi Lagi, Harga Solar Subsidi Lebih Mahal dari Nonsubsidi

Pemerintah dinilai membohongi rakyat dalam penentuan harga bahan bakar minyak jenis solar. Pasalnya, meskipun harga solar bersubsidi diturunkan Rp500 mulai 1 April menjadi Rp5.150 per liter, ternyata masih lebih tinggi dari harga solar nonsubsidi.

“Pemerintah tidak transparan dalam penghitungan penetapan solar bersubsidi, ini sebagai bukti bahwa rakyat dibohongi lagi. Jika Pemerintah benar-benar memberikan subsidi Rp1.000, harusnya solar bersubsidi yang dijual kepada masyarakat harganya berkisar Rp 4.150-Rp 4.500/liter,” ujar Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/4).

Menurut Bambang, Logikanya solar subsidi lebih murah dibandingkan solar nonsubsidi, tetapi mengapa sebaliknya? Ini mengindikasikan ada manipulasi



besar oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan harga BBM subsidi tersebut.

“Saya meminta agar Pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap subsidi solar untuk transportasi logistik yang mulai terabaikan. Jika hal tersebut benar-benar dilakukan, maka saya jamin perekonomian kita akan tumbuh dan menggeliat karena harga yang murah bisa meningkatkan daya beli masyarakat nantinya,” tutupnya. /Ismed

Masih Bermasalah, YLKI: Hati-hati Beli Properti di Area Reklamasi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati membeli properti di area reklamasi Teluk Jakarta karena bisa berisiko di kemudian hari.

“Reklamasi Teluk Jakarta masih bermasalah terkait perizinan, dan kelayakan dari sisi lingkungan. Ironisnya pengembang sudah gencar menawarkan atau mengiklankan penjualan produknya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (8/4).

YLKI menilai potensi untuk timbul sengketa di area reklamasi Teluk Jakarta di kemudian hari sangat besar sedangkan konsumen yang membeli properti memiliki posisi hukum yang sangat lemah.

Karena itu, demi menghindari pelanggaran hak-hak konsumen, YLKI menyarankan masyarakat tidak

tergiur oleh tawaran produk properti di area reklamasi Teluk Jakarta, sebelum masalah perizinan reklamasi mengalami titik terang.

“Setidaknya pengembang harus memiliki empat dokumen hukum atau perizinan sebelum memasarkan produk properti, yaitu izin prinsip, izin reklamasi, izin pemanfaatan reklamasi dan izin mendirikan bangunan,” tuturnya.

Tulus mengatakan semua izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini sejumlah pengembang baru memiliki izin prinsip.

“Karena itu, jangan sekali-kali melakukan transaksi produk properti hasil reklamasi apabila pengembang belum memiliki empat perizinan tersebut,” katanya.

Terkait dengan hal tersebut, YLKI juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan promosi atau pemasaran produk properti hasil reklamasi oleh pengembang yang belum memiliki empat dokumen perizinan. /Arbie Marwan

Triwulan I 2016, ESDM Klaim Lifting Migas Lampau Target APBN

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) klaim menoreh hasil positif dalam realisasi lifting minyak dan gas bumi pada triwulan pertama 2016.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I Gusti Nyoman Wiratmadja melaporkan bahwa realisasi lifting tercatat sebesar 835 ribu barel per hari (MBOPD) atau terealisasi sebesar 100,6 persen dari target APBN 2016 sebesar 830 ribu barel per hari.

“Rata-rata perbulan dari Januari hingga maret terealisasi 835 ribu barel per hari. Terealisasi 100,6 persen dari target. Untuk bulan Januari terealisasi 819 ribu barel per hari, Februari 840 ribu barel per hari sedangkan Maret sebanyak 847 ribu barel per hari,” kata Wirat dalam konferensi pers di kantornya kawasan Kuningan Jakarta, Jumat (8/4).

Selain itu, dalam realisasi lifting gas, Wirat mengaku bawa Ditjen Migas mampu mencapai 105 persen dari target APBN 2016 sebesar 8.200 juta kaki kubik (MMSCFD). Angka itu jauh melampaui target Work Planing and Budgeting (WP&B) yang ditetapkan sebesar 7.825 juta kaki kubik (MMSCFD).

“Demikian juga target lifting gas bumi di APBN itu ditargetkan produksi kita 8.200 MMSCFD, tapi di Maret bahkan mencapai 8.290 MMSCFD, ini naik menjadi 105 persen. Karena lapangan sudah banyak yang mature,” kata dia.

Kemudian dia memastikan, realisasi lifting minyak pada bulan April ini akan mampu terjaga. Ia memperkirakan lifting akan berada di kisaran 840 MBOPD hingga 841 MBOPD. Begitu juga gas bumi, yang mana diprediksi masih terjaga pada angka 8.115 MMSCFD. /Arbie Marwan

Ada Nama Menteri Rini di Panama Papers, Uchok: Jokowi Harus Bawa ke Ranah Hukum



Data nama-nama orang Indonesia yang disebut-sebut dalam skandal Panama Papers tak dapat didiamkan saja. Apalagi ada nama Menteri BUMN, Rini Soemarno di dalamnya.

Untuk itu, Ceter for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh

menganggap enteng skandal ini, mesti membongkar dan menyeretnya ke ranah hukum.

“Karena kasus Panama Papers

ini ada dugaan money laundry, pengemplangan pajak, sekaligus pengkhianatan terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tandas Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, kepada Aktual.com, di Jakarta, Kamis (7/4).

Di beberapa negara di luar negeri,

para pejabat yang terlibat dalam skandal Panama Papers ini merasa malu, dan akhirnya mengundurkan diri. Seperti Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, satu negara di Eropa Utara.

“Ingat, di Islandia, Perdana Menteri mundur gara-gara Panama Papers ini, tapi di Indonesia Presidennya kok malah santai-santai saja,” kritik dia.

Menurut Uchok, skandal Panama Papers bukan hal biasa. Karena banyak nama-nama orang penting yang tercatat di dalamnya.

“Bahkan ada nama Menteri Rini Soemarno masuk data itu, kenapa Presiden diam saja? Ini bukti Presiden tidak sensitif terhadap persoalan ini (Panama Papers),” cetus Uchok.

Untuk itu, Uchok meminta Jokowi agar persoalan Paper Panama ini, dibongkar dan ditindaklanjuti secara hukum oleh KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Kejaksaan dan Polri.

“Harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” cetus Uchok. /Arbie Marwan

Pertamina: Proyek dengan Anak Wapres JK itu B to B, Jadi Tak Butuh Tender!

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Puspongoro membantah adanya proyek tanpa tender yang digarap oleh PT Bumi Sarana Migas milik Solihin Kalla anak dari Wapres JK.

Wianda menegaskan pembangunan terminal penyimpanan LNG (Gas Alam Cair) Bojonegara, Banten, Jawa Barat dilakukan secara Business to Business (B to B) sehingga pihak Pertamina tidak membutuhkan pembukaan tender untuk melakukan kontrak.

“Jadi ini B to B, kita bukan buka tender, kita hanya sebagai off taker,” cetus Wianda di Gedung Pertamina Jakarta Pusat, Senin (4/4).

Menurutnya sejauh ini Pertamina telah melakukan kerjasama berdasarkan aturan-aturan yang ada. Pihak Pertamina memposisikan diri sebagai off taker menunggu hingga proyek tersebut selesai dikerjakan



oleh PT Bumi Sarana Migas.

“Kita berdasarkan peraturan yang benar, semua itu prosesnya ada, kemudian disitu kita hanya off taker, Pertamina belum banyak terlibat karena kita hanya memastikan nanti BSM melakukan proyek itu sesuai peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Namun walau demikian katanya, bukan berarti Pertamina tidak mempunyai hak untuk melakukan negosiasi dan memberi masukan pada BSM dalam proses

pembangunan proyek.

“Bukan berarti kita terikat, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembicaraan, negosiasi. Jadi yang paling berkepentingan terhadap proyek itu adalah pemilik proyek sendiri atau BSM, yang mengakuisisi lahan, yang melakukan pembangunan proyek, termasuk juga ada mitra dari Jepang. Kalau Pertamina nanti setelah pembangunan proyek selesai baru kita terlibat,” pungkasnya. /Arbie Marwan

“Kepretan Sang Naga” di Perairan Natuna

Ulah provokatif China menyelamatkan kapal nelayannya, yang mencuri ikan di perairan Indonesia, menimbulkan ketegangan baru dengan Indonesia. Tetapi kecil kemungkinan pecahnya konflik terbuka, karena akan terlalu mahal harga yang dipertaruhkan oleh kedua negara.

Sang naga yang sedang penuh rasa percaya diri sedang “mengepretkan” ekornya ke kanan-kiri. Kini “kepretan” itu sampai juga ke perairan Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia yang berhadapan dengan Laut China Selatan. Mungkin inilah gambaran tentang perilaku China, yang sebagai super power baru secara ekstensif, agresif, bahkan provokatif, terus menegaskan keberadaannya.

Insiden bermula dari terdeteksinya kapal nelayan China, KM Kway Fey 10078, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna. Istilahnya: kapal itu melakukan praktik *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* di perairan Indonesia. Kapal itu terdeteksi pada Sabtu (19 Maret 2016) pukul 14.15. Kapal ini memang sudah sering mencuri ikan di perairan Indonesia, sehingga menjadi target operasi kapal KP Hiu 11, yang sedang menjalankan operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL.

Kapal pengawas KP Hiu 11 lalu mengejar

dan melepaskan tembakan peringatan, namun KM Kway Fei tidak mau berhenti. Ia malah melakukan gerakan zig-zag. Tabrakan pun tak terhindarkan antara KM Kway Fei dan KP Hiu 11. Tiga personel KP Hiu 1 lalu melompat ke KM Kway Fei dan berhasil melumpuhkan delapan ABK (anak buah kapal) KM Kway Fei. Para ABK itu lalu dipindahkan ke KP Hiu 11.

KM Kway Fei lalu digiring oleh KP Hiu 11, untuk ditangkap dan dijadikan barang bukti. Namun pada pukul 15.00 WIB, tiba-tiba muncul kapal pengawal pantai China, yang dengan kecepatan 25 knot mengejar iring-iringan KP Hiu 1 dan kapal tangkapan. KP Hiu 11 mencoba menghubungi kapal pengawal pantai China lewat radio, namun tak ada jawaban. KP Hiu 11 lalu menghubungi pangkalan TNI AL untuk memberitahu kejadian tersebut.

Manuver Berbahaya Kapal China

Kapal pengawal pantai China lalu menabrak kapal KM Kway Fei, yang sedang digiring oleh KP Hiu 11. Manuver berbahaya itu diduga sengaja dilakukan untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey. Akibat tabrakan, KM Kway Fei pun rusak. KP Hiu 11 lalu memutuskan untuk meninggalkan kapal

tangkapan guna menghindari insiden lebih jauh.

Namun, delapan ABK asal China tetap dibawa ke Pulau Tiga Natuna, untuk diproses hukum.

Media Australia, News.com.au menyebutkan, penangkapan tersebut terjadi di wilayah Indonesia, atau tepatnya 4,34 km dari Pulau Natuna. Wilayah ini, sesuai ketentuan hukum laut internasional UNCLOS 1982, adalah bagian dari zona ekonomi



Hua Chunying





eksklusif (ZEE) Indonesia, yang terentang sejauh 200 mil dari garis pantai.

Sikap Indonesia jelas dan tegas. Dalam perspektif Kementerian Luar Negeri RI, yang disampaikan kepada pihak China, ada tiga jenis pelanggaran yang dilakukan kapal *Coast Guard* China. Pertama, kapal itu melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas

kontinen. Kedua, kapal China itu berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum oleh otoritas Indonesia. Terakhir, kapal penjaga pantai China melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Sedangkan pemerintah China berdalih, KM Kway Fey yang ditangkap tersebut masih di wilayah perairan China. China berkilah, lokasi kejadian tersebut merupakan tempat yang secara tradisional biasa

didatangi para nelayan China dan itu bukan perairan Indonesia.

Hal itu dikatakan Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying di Beijing, Senin (21 Maret 2016). Bahkan pihak China bersikeras, keberadaan kapal *Coast Guard* mereka bertujuan menyelamatkan nelayan yang "diserang" pihak Indonesia.

"Kapal nelayan China diserang kapal bersenjata Indonesia. Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengadakan konferensi pers terkait penangkapan kapal pelaku Illegal Fishing KM Kway Fey 10078 oleh KP Hiu di Perairan Natuna di Kediaman Widya Chandra pada Minggu, 20 Maret 2016. Menteri Susi Pudjiastuti didampingi oleh Laksamana Madya TNI Arie Henrycus Sembiring, Dir Polair Baharkam Mabes Polri dan Brigadir Jenderal Muhammad Chaerul Noor Alamsyah.

penjaga pantai lalu ke sana untuk menyelamatkan, tanpa memasuki perairan Indonesia," kata Hua. Beijing juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan dan menjamin keamanan seluruh nelayan China yang ditangkap.

Menolak Tegas Dalih China

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak tegas dalih yang diajukan China. Menurut Susi, tidak ada kesepakatan internasional apapun yang mengakui atau mengenali apa yang diklaim oleh Pemerintah China sebagai "wilayah tradisional nelayan China."

Perairan di bagian utara Kepulauan Natuna memang berdekatan dengan batas selatan klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan, yang mereka rangkum dalam sembilan garis putus-putus (*nine dash lines*). Garis itu ditarik berdasarkan klaim sepihak China, yang merujuk sejarah jangkauan para pelaut dan nelayan kekaisaran China pada masa lampau, bukan berdasarkan hukum internasional yang disepakati. Berdasarkan "warisan sejarah," China mengklaim 80 persen wilayah Laut China Selatan sebagai perairannya, meski klaim sepihak itu tidak diakui oleh hukum internasional manapun.

Ketegangan Indonesia dan China soal kapal nelayan sudah beberapa kali terjadi. Pada Maret 2013, sejumlah kapal China yang dilengkapi senjata mengonfrontasi kapal patroli perikanan Indonesia. Mereka menuntut, nelayan China yang ditangkap di perairan Kepulauan Natuna dibebaskan.

Pada 2010, kapal penegak hukum maritim China juga

meminta kapal patroli Indonesia membebaskan kapal nelayan asal China, yang ditangkap karena diduga mencuri ikan. Pada 22 November 2015, kapal TNI AL dari Armada Barat mengusir kapal nelayan China yang masuk ke ZEE di sekitar Natuna.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Sun Weide,

dan mengajukan nota protes resmi. Retno menyampaikan fakta lapangan mengenai penggalan penangkapan kapal ikan China, yang mencuri ikan di perairan Natuna. Menlu Retno mengajak China untuk menghormati hukum internasional, termasuk konvensi PBB tentang hukum laut.

Mengakui Kedaulatan Indonesia
Pada pertemuan Menlu RI





dengan Menlu China Wang Yi, pada November 2015, di Kuala Lumpur, Malaysia, pihak China telah menegaskan bahwa Kepulauan Natuna dan perairan di sekitarnya adalah milik Indonesia dan hal itu sudah diakui China. Jadi tidak ada masalah terkait kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Tidak ada tumpang tindih klaim atas kepulauan itu.

Indonesia juga bukan negara

pengklaim, dan tidak terlibat dalam sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan. Ini berbeda dengan negara ASEAN lain, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam, yang mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan.

Menyikapi insiden terakhir, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengatakan, pemerintah RI

harus segera mereorganisasi dan memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tujuannya, agar Bakamla sebagai lembaga penegak hukum, yang di-back-up oleh TNI AL, dapat melakukan tugasnya, seperti penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan di laut.

“Negara harus segera melengkapi kapal-kapal patroli Bakamla demi kepentingan bangsa dan negara. Ini sebuah kebutuhan yang menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan,” ujar Hasanuddin.

Sedangkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 21 Maret 2016 menyatakan, Indonesia tidak akan serta merta mengerahkan kekuatan militer tambahan di Natuna. Meskipun dua hari sebelumnya, kapal penjaga pantai China masuk ke perairan Natuna serta menggagalkan penangkapan kapal pencuri ikan oleh petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Untuk apa? Kita tidak ada musuh, kok,” ujar Ryamizard.

Menurut Ryamizard, Kementerian Pertahanan telah memiliki rencana penambahan kekuatan TNI di Natuna. Ryamizard memberi contoh proyek perbaikan dan pelengkapan Pangkalan Udara Ranai, Natuna. Tujuannya, agar pesawat tempur andalan TNI jenis Sukhoi dan F-16 dapat mendarat di Natuna.

Secara hitung-hitungan, insiden ini tidak akan menimbulkan konflik terbuka atau bentrokan militer besar antara China dan Indonesia, karena keduanya punya kepentingan yang lebih besar, yang tak akan dikorbankan oleh keduanya.

Investasi China dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia –salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-- akan menjadi taruhan. Di sisi lain, potensi Indonesia sebagai mediator atau penengah konflik antara China dengan sejumlah negara ASEAN, terkait tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan, juga tak akan dikorbankan oleh China. ■ Satrio Arismunandar

Dejumlah tokoh, ulama, dan seniman dari kalangan Nahdlatul Ulama, seperti, Wakil Ketua Umum PBNU Marsudi Syuhud, Budayawan KH. Zawawi Imron, Ketua Umum Lesbumi PBNU Agus Sunyoto, Wakil Ketua Lesbumi PBNU Candra Malik, penyanyi religi Opick, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menghadiri 'Anugerah Saptawikrama Lesbumi PBNU', Harlah Ke-54 Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), yang digelar di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta.

Dalam acara tersebut Ketum Lesbumi PBNU, Agus Sunyoto mengatakan, awal mula dibentuknya Lesbumi yaitu, karena munculnya kegelisahan masyarakat seni budaya Indonesia akibat menegangkannya persaingan kubu Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) dan Manifesto Kebudayaan (Manikebu).

"Lesbumi lahir berada di antara keduanya dan tidak berpihak ke kubu mana pun," ungkap Agus, kepada Majalah Aktual, ketika memberikan pidato sambutannya, baru-baru ini.

Kembalinya Lesbumi. Agus menjelaskan, bahwa kiprah dan eksistensi Lesbumi pernah dibungkam pada tahun 1966 silam. Karena, di saat itu memasuki era Orde Baru, dan Lesbumi dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah rezim Orba.

Dan tepatnya pada tahun 2001, pasca tumbangannya Orba, teretuslah ide untuk membangkitkan kembali Lesbumi yang dibahas dalam Muktamar PBNU. Setelah tiga tahun kemudian, Lesbumi pun aktif kembali sebagai lembaga yang menghimpun ragam penggiat seni. Seperti, pelukis, pekerja film, sastrawan, serta ulama, di bawah naungan PBNU.

Lanjut Agus, sejak awal didirikan hingga saat ini, Lesbumi tetap konsisten untuk memadukan seni budaya dan religi Islam.

"Karena keduanya merupakan satu kesatuan yang hidup dan menghidupi masyarakat di Nusantara," tutur ia sambil melempar senyum.



Kepribadian Autentik Islam Nusantara Melalui Lesbumi NU

Ia kembali mengungkapkan, untuk saat ini Lesbumi tengah aktif mengumpulkan ribuan manuskrip guna menelusuri dan melembagakan kembali kepribadian autentik Islam Nusantara. Sebab, menurut ia, Indonesia sedang menghadapi serbuan budaya dan kesenian asing yang membuat masyarakat lupa tentang jati dirinya.

7 Strategi Lesbumi. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua

Lesbumi PBNU, Chandra Malik pun mengungkapkan program dan strategi kebudayaan Saptawikrama yang dirancang khusus untuk menghadapi krisis multi-bangsa yang tengah berlangsung akibat globalisasi. Semua krisis tersebut yang, menurut ia, hanya berujung terhadap pengerdilan bangsa Indonesia sendiri.

"Bangsa kita pada gilirannya mulai kehilangan rasa guyub,



Menag Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kiri) berfoto bersama ketua Lesbumi KH Agus Sunyoto (kedua kiri), Kyai Marzuki (kiri), perwakilan keluarga pendiri Lesbumi Jamaludin Malik (tengah), Mutiara Sani (ketiga kanan), seniman Candra Malik (kedua kanan), dan penyair D. Zawawi Imron (kanan) berfoto bersama pada peringatan Harlah Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) ke-54 di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (24/3). Peringatan Harlah kali ini diisi dengan pidato kebudayaan ketua Lesbumi, deklarasi Tujuh Strategi Kebudayaan Islam Nusantara (Saptawikrama) dan penyerahan anugerah Saptawikrama kepada para tokoh pendiri Lesbumi.

gotong-royong, dan kemandirian. Segekap identitas yang kita miliki pun tercerabut,” tutur ia, di tempat yang sama.

Adapun tujuh strategi kebudayaan Lesbumi yaitu, pertama, adalah menghimpun dan mengonsolidasikan gerakan berbasis adat istiadat, tradisi, dan budaya Nusantara. Kedua, mengembangkan model pendidikan sufistik yang berkaitan erat dengan realita di setiap satuan pendidikan.

“Terutama yang dikelola lembaga pendidikan formal, yakni Maarif dan Rabithah Ma’ahid Islamiah (RMI),” jelas Chandra.

Masih dari Chandra, ketiga, membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis maupun epistemologis

keilmuan. Keempat, menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhineka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban Maritim Nusantara.

Kelima, menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhineka Tunggal Ika. “Berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan,” katanya lagi menambahkan.

Selanjutnya keenam, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara. “Dan terakhir, mengutamakan prinsip juang berdikari identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global,” tambah Chandra.

Tata Peradaban Dunia. Selain itu, Menag Lukman dalam sambutannya membicarakan bahwasannya Saptawikrama (al Qowa’id as Sab’ah) (atau Tujuh Strategi Kebudayaan Islam Nusantara Lesbumi NU) yang akan dikembangkan oleh Lesbumi di masa-masa mendatang yaitu, cermin atau indikator bahwa Lesbumi antisipatif dan memiliki kemampuan untuk merespon dan menyikapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

“Pada hakikatnya budaya adalah karya yang senantiasa berubah, tidak ada budaya yang mati karena bila mati maka tidak eksis lagi di atas muka Bumi ini. Karenanya, saya pertama mensyukuri adanya Lesbumi di usianya yang ke-54 yang kemudian

mampu merumuskan lalu kemudian melahirkan tujuh strategi kebudayaan yang mudah-mudahan ini tidak hanya dalam rangka ikut menjaga nilai-nilai Islam ala Ahlul-sunnah wal Jamaah yang selama ini dikembangkan dan diperjuangkan oleh Nahdhatul Ulama, tapi strategi kebudayaan ini dalam rangka untuk tetap menjaga ke-Indonesiaan kita, itu yang penting,” tutur Menag Lukman.

“Dan tentu seperti harapan yang disampaikan KH. Marsudi Syuhud, Lesbumi bisa berkontribusi menata peradaban dunia, Saya merasa bersyukur dan karenanya saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas rumusan yang telah dihasilkan oleh Lesbumi,” ucap ia menambahkan.

Anugerah. Di tempat yang sama, pengurus Lesbumi juga memberikan penghargaan bagi para tokoh yang berperan dalam berdirinya Lesbumi NU. Di antaranya, mantan Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri, tokoh film Usmar Ismail dan Asrul Sani yang diterima oleh perwakilan keluarga, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku putra KH. Saifuddin Zuhri, artis senior Mutiara Sani dan putra Usmar Ismail yang diserahkan Ketua Lesbumi NU KH. Agus Sunyoto.

Penyerahan anugerah ini disusul dengan pidato kebudayaan yang disampaikan oleh Ketua Lesbumi H. Agus Sunyoto. Dalam pidato tersebut, Agus Sunyoto menekankan perlunya menghargai, menjaga, serta memelihara kebudayaan lokal Indonesia termasuk dalam konteks pengamalan nilai-nilai Islam.

Acara pun semakin marak dengan tampilnya sejumlah seniman dan budayawan. Misalnya, penyanyi religi Opick dan Chandra Malik, penyair D. Zawawi Imron, dan kelompok karawitan Sekarwidya Makara Universitas Indonesia.

Pengunjung yang datang tidak hanya dari kalangan NU, tetapi juga para penikmat seni yang berasal dari masyarakat umum. ■ Refly Mulyadi-Ferro Maulana

Mengenal Lebih Dekat Penyakit Epilepsi



Irawaty Hawari

Masih banyak di kalangan masyarakat yang masih awam dengan penyakit epilepsi serta bagaimana cara mengantisipasinya. Perlu diketahui sedikit definisi mengenai epilepsi adalah penyakit serius menahun yang berkaitan dengan saraf. Di mana disebut sebagai epilepsi ketika penderita mengalami kejadian sekilas tentang paroksismal akibat dari letupan-letupan berlebihan neuron di korteks otak. Biasanya epilepsi didiagnosa setelah seseorang telah mengalami kejang-kejang setidaknya dua kali tanpa disebabkan oleh kondisi kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, *Majalah Aktual* menanyakan perihal tersebut kepada Dr. Irawaty Hawari, SpS, selaku Ketua Yayasan Epilepsi Indonesia (YEI) tentang apa sebenarnya penyakit epilepsi tersebut. Ia pun menjelaskan, bahwa epilepsi merupakan penyakit yang berkaitan dengan neurologi yang bisa terjadi terhadap semua orang tanpa mengenal batasan usia, jenis kelamin, ras maupun status sosial.

“Epilepsi adalah salah satu penyakit neurologi menahun yang dapat terjadi

pada semua orang tanpa batasan usia, jenis kelamin, ras, maupun status sosial-ekonomi. Pada suatu serangan epilepsi, terjadi aktivitas atau cetusan listrik abnormal di otak, dengan bentuk manifestasi berupa serangan-serangan kejang atau bentuk lain seperti perubahan tingkah laku, perubahan kesadaran dan perubahan-perubahan lain yang hilang timbul, baik yang terasa atau terlihat,” ujar dokter Ira, kepada *Majalah Aktual*, di Jakarta, baru-baru ini.

Selanjutnya, dokter Ira menjelaskan kembali bahwa gangguan listrik yang terjadi di dalam otak manusia tersebut dapat disebabkan antara lain oleh kerusakan jaringan. Misalnya, tumor otak, cedera kepala, atau akibat gejala sisa dari suatu penyakit seperti infeksi otak (meningitis, encephalitis, red), gangguan pembuluh darah otak (stroke), cacat lahir, kelainan genetika, serta sekitar 30 persen tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan, manifestasi serangan dapat berbeda-beda tergantung pada fungsi otak mana yang terganggu.

Jangan Kucilkan ODE. Orang dengan Epilepsi (ODE) seringkali mengalami keterbatasan dalam

memilih jenis pekerjaan, sehingga mereka seringkali harus memilih profesi khusus dan fokus pada area kerja spesifik sejak dini. Peran keluarga dan lingkungan sekitar diperlukan untuk mendukung orang dengan epilepsi dalam membantu mereka mengenali dan mengembangkan potensi dirinya.

Apabila epilepsi dikelola secara baik melalui pengobatan secara teratur, orang dengan epilepsi dapat mencapai kualitas hidup yang baik. Dikatakan oleh dokter Irawaty, penyakit epilepsi tidak hanya berdampak pada penyandang itu sendiri, tetapi juga terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya. Banyak ODE yang berpikir bahwa dengan penyakit yang dideritanya, mereka memiliki keterbatasan ruang dan

sosialisasi dalam mengembangkan potensi dirinya.

“Bagi ODE hambatan yang ditakutkan adalah apabila terjadi bangkitan epilepsi mendadak dan berisiko menimbulkan cedera fisik. Pihak keluarga harus memperhatikan hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya bangkitan di samping minum obat teratur, tidur atau istirahat yang cukup, makan teratur, hindari kelelahan atau aktivitas yang berlebihan,” jelas dokter Ira.

“Sebaiknya hindari stres psikologis, untuk jenis epilepsi tertentu, hindari menonton televisi atau berada di depan komputer yang menyala dalam waktu lama. Sedangkan, hambatan sosial yang dihadapi adalah dikucilkan dari lingkungan akibat stigma negatif, sehingga menyebabkan anak dikeluarkan dari sekolah, kesulitan mendapat pekerjaan, takut untuk menikah, dan lainnya. Akibat lebih lanjut yang dapat terjadi sebagai konsekuensi masalah psikologis tersebut adalah meningkatnya

risiko gangguan cemas, depresi dan kepercayaan diri yang rendah pada orang dengan epilepsi,” beber dokter Ira menambahkan.

Penanganan ODE. Dr. Irawati Hawari, SpS, mengungkapkan, 70 persen dari penderita epilepsi dapat mengendalikan bangkitan/seizure dengan obat anti-epilepsi (OAE). OAE bertujuan untuk mencegah bangkitan (atau seizure terjadi), tetapi tidak menyembuhkan epilepsi.

“Obat anti epilepsi adalah obat untuk mencegah berulangnya bangkitan/kejang pada ODE,” ujar dokter Ira

Beberapa orang mungkin tidak dapat mengontrol penuh bangkitan/seizure meskipun mereka melakukan pengobatan yang sesuai dengan jenis bangkitan (seizure) yang mereka alami. Beberapa tindakan dapat dilakukan apabila terjadi bangkitan/seizure epilepsi, yaitu:

1. tenang, beradalah di samping orang tersebut.
2. kepalanya untuk memberikan udara dan mencegah

penyumbatan udara oleh air liur.

3. pakaian yang ketat seperti dasi sehingga memungkinkan tetap mendapat udara.
4. dari bahaya (terutama benda tajam).
5. memasukan apapun ke dalam mulutnya.
6. menahan gerakan yang bersangkutan.
7. keadaan berbahaya segera bawa ke rumah sakit dan hubungi dokter terdekat.

Yang terpenting dijelaskan oleh dokter Ira, yakni, ODE tidak dapat sembarang mengganti obat mereka karena dapat menimbulkan kejang yang disebut “Epileptikus”.

“Pergantian jenis obat, dan dosis obat yang mendadak dapat menimbulkan kejang yang gawat darurat yang disebut status epileptikus. Dosis dan jenis obat yang tidak sesuai akan menyebabkan kejang tidak dapat dikontrol,” tutur ia. ■

Leonina K Lahama-Ferro Maulana

Penanganan Psikologi ODE

Di kesempatan yang sama, Aska Primardi, Praktisi Psikologi, peneliti perilaku konsumen mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang menghambat ODE dalam mengembangkan potensi dirinya.

Ada beberapa faktor penghambat ODE dalam mengembangkan potensi dirinya:

Pertama adalah faktor medis, semakin sering terkena serangan dapat mengakibatkan semakin besar penurunan kemampuan otak dalam berpikir dan mengingat. Hal ini dapat mengakibatkan ODE kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, ataupun menemukan dan mengembangkan potensi dirinya.

Kedua yaitu, faktor psikologis, berhubungan dengan kecemasan, penurunan harga diri, penurunan kepercayaan diri, depresi, hingga perilaku bunuh diri. Jika pikiran ODE sudah terfokus hanya pada masalah-masalah pribadi yang berujung pada gangguan psikologis, maka ODE tidak akan sempat lagi mengenali potensi/bakat dalam

dirinya dan juga beraktivitas untuk mengembangkan potensi dirinya.

Ketiga yakni faktor sosial, adanya Stigma/persepsi negatif tentang epilepsi yang membuat masyarakat umum takut atau tidak mau bergaul dengan ODE. Pada akhirnya ODE pun tidak dapat mengembangkan potensi dirinya karena minimnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Aska juga menambahkan, “ODE boleh menjalankan aktivitas sesuai minatnya, tetapi perlu diingat tentang komitmen untuk hidup sehat sebagai ODE. ODE harus mampu melakukan beberapa hal yaitu, mampu mengambil inisiatif, mampu mengatasi masalah sendiri, mampu mengambil keputusan, mampu mengontrol diri sendiri, keinginan untuk mandiri, dan berkeinginan untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain.”

Menurut Aska ada tiga bentuk dukungan keluarga yang dapat diberikan

kepada ODE, yaitu, Pertama, dukungan instrumental yaitu dukungan yang diberikan dalam wujud nyata untuk menolong ODE secara langsung. Keluarga rutin membantu penyediaan obat anti epilepsi, memberikan bantuan dalam bentuk barang ataupun finansial untuk pelatihan dan pengembangan potensi diri ODE.

Kedua, dukungan informasi yang diharapkan dapat membantu individu untuk memahami hal-hal yang memunculkan stres, mencari tahu sumbernya, dan memahami bagaimana strategi coping yang tepat. Informasi yang diberikan berupa nasehat, saran, petunjuk, dan umpan balik.

Ketiga, dukungan emosional yang berasal dari teman dan keluarga dengan cara meyakinkan individu bahwa ia adalah individu yang pantas menerima perhatian, cinta, maupun simpati. “Dengan demikian, individu akan merasa diperhatikan oleh orang lain,” jelas Aska.

Presiden Putuskan Iuran BPJS Kelas III Tetap



Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan iuran bagi peserta mandiri asuransi sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri kelas III tidak mengalami kenaikan per 1 April 2016.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/03), mengatakan, bahwa Presiden memutuskan iuran bagi peserta BPJS Kelas III tidak dinaikkan.

“Kelas III ini memang betul-betul untuk masyarakat dan rakyat bawah yang sebelumnya diusulkan untuk dinaikkan dalam Perpres Nomor 19 menjadi Rp30.000 dari Rp25.500, Presiden memutuskan untuk dikembalikan,” kata Pramono, kepada jurnalis media.

Ia menambahkan, hal itu berarti iuran untuk Kelas III tetap diberlakukan untuk pesertanya yakni Rp25.500.

Melalui kebijakan yang baru juga, kata dia, peserta BPJS Kelas III sebelumnya tidak bisa ‘up grade’ untuk mendapatkan layanan di Kelas I namun hal ini kemudian kini dimungkinkan.

“Karena tidak boleh ada diskriminasi dalam hal itu maka yang seperti itu yang bersangkutan diperbolehkan di kelas I. Jadi masuk

sebagai anggota iuran kelas III dalam perjalanan ketika dia sakit perlu perawatan kelas I sekarang diperbolehkan,” katanya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan, kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan berlaku bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Revisinya, untuk kelas I, yang awalnya Rp59.500, menjadi Rp80 ribu per bulan. Untuk kelas II, yang semula Rp42.500, menjadi Rp51 ribu. Untuk kelas III tetap dikenai tarif Rp25.500 per bulan. Untuk PBI, besarnya naik dari Rp19.225 menjadi Rp23 ribu per bulan.

Keputusan sebelumnya untuk menaikkan keseluruhan pada dasarnya sudah final namun ketika mendapatkan reaksi dan masukan dari masyarakat termasuk dari DPR dan berbagai pemangku kepentingan maka khusus Kelas III dinyatakan iuran tetap.

“Kami melihat dalam kondisi seperti ini maka untuk Kelas III perlu ada perlindungan yang diberikan oleh negara. Negara hadir dalam persoalan itu. Hanya untuk Kelas III karena memang paling bawah,” kata ia menutup pembicaraan. /Ferro Maulana

Indonesia Sertakan Satu Film dalam Beijing International Film Festival

Indonesia menyertakan satu judul film bertajuk #66 pada Festival ke-6 Film Internasional Beijing (Beijing International Film Festival /BJIFF) yang berlangsung 16 hingga 23 April.

Film bergenre aksi produksi Oktober 2015 tersebut merupakan film besutan sutradara Asun Mawardi, dengan salah satu bintang utamanya Donita.

Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Beijing Santo Darmosusanto di Beijing, Rabu (30/03), mengatakan keikutsertaan film Indonesia pada BJIFF merupakan hal positif untuk lebih memperkenalkan Indonesia, khususnya film Indonesia.

“Setidaknya keikutsertaan tersebut dapat memberikan nilai tambah mengenai Indonesia di masyarakat Tiongkok, khususnya Beijing, tentang Indonesia dan sinema Indonesia,” ujar ia menambahkan.

Keterangan tertulis oleh panitia BJIFF kepada Antara menyebutkan, terdapat sekitar 2.329 judul film dari 105 negara yang sudah diterima panitia, terdiri atas 1.964 film asing dan 365 film produksi lokal.

Panitia akan menyeleksi 500 film dan akan diputar di sekitar 25 bioskop dan lima universitas. Film #66 akan diputar tiga kali.

Para juri akan menetapkan film terbaik berdasar beberapa kategori yang telah ditetapkan, untuk memperebutkan penghargaan tertinggi dalam ajang itu, yakni “Tiantan” seperti Oscar di AS.

Industri film Tiongkok kini menempati urutan pertama terbesar di Asia dan ketiga terbesar di dunia.

Pada penyelenggaraan BJIFF 2015, lebih dari 300 film ditayangkan dengan nilai kontrak kerja sama mencapai 2,2 miliar dolar AS.

Indonesia pernah menyertakan film bertajuk *The Mirror Never Lies* besutan Kamila Andini pada FFBI 2013. /Ferro Maulana

Kemenkes Siapkan Permenkes Wajib Kerja bagi Dokter Spesialis

Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permenkes) tentang penugasan wajib kerja dokter spesialis dan dokter gigi spesialis untuk distribusi pemenuhan tenaga medis di daerah terpencil, tertinggal dan terluar.

“Kami sedang merancang regulasi yang memastikan adanya keadilan dalam menempatkan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan di daerah yang dianggap tidak mampu dan tidak diminati,” kata Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek, kepada wartawan, dalam pembukaan Rakerkesnas di Jakarta, Kamis (31/003).

Menteri Nila mengatakan, ketersediaan dokter spesialis menjadi keluhan yang sering diajukan oleh Pemerintah Daerah, yakni Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Regulasi Peraturan Presiden



(Perpres) dan Permenkes tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Penugasan Wajib Kerja Dokter Spesialis sedang disusun untuk pemenuhan lima bidang, yakni dokter spesialis anak, kebidanan dan kandungan, bedah umum, penyakit dalam dan anestesi atau pembiusan.

“Begitu lulus dari spesialis kebidanan, mereka harus ke daerah dulu satu sampai dua tahun. Ini sudah diatur sampai ke Perpres. Sudah di-ACC tinggal ke Presiden saja nanti,” ujar Nila.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

SDM Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri mengatakan ke depannya akan dikembangkan wajib kerja untuk spesialis di luar lima bidang tersebut.

“Bagi spesialis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan dokter gigi spesialis (PPDGS) apabila sudah selesai pendidikannya, wajib kembali ke daerah pengusul dan dilakukan koordinasi dengan rumah sakit yang membutuhkan,” kata Usman.

Ia menjelaskan kerja sama dengan beberapa profesi dan kolegium ini akan membuat pemetaan rumah sakit mana saja yang tidak memiliki dokter spesialis dan pemetaan dokter spesialis yang akan diganggu setelah habis masa kerja wajibnya.

Upaya pemenuhan ketersediaan dokter spesialis di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal ini untuk mendukung implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GEEMAS) dan Program Keluarga Sehat yang berbasis masyarakat. /Ferro Maulana

Indonesia Rugi Rp110 Triliun dari 'Medical Tourism', Ini Pencegahannya



Dari data Kementerian Kesehatan pada tahun 2011 telah mencatat total kerugian devisa akibat banyaknya pasien di Indonesia yang melakukan 'medical tourism' ke luar negeri mencapai Rp110 triliun. Hal tersebut tentunya menjadi suatu keprihatinan bagi negara dan segera membutuhkan inisiatif dari penyedia layanan kesehatan di Indonesia untuk mengembangkan program 'medical tourism' di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, Sahid Sahirman Memorial Hospital (SSMH) mulai hari ini, Selasa (29/03), meluncurkan program 'medical tourism' di Indonesia yaitu suatu

program yang mengawinkan layanan program kesehatan dan pariwisata. Hal itu disampaikan oleh dr Bernard Sidharta, Managing Director PT.Sahid Sahirman Memorial Hospital.

“Dengan konsep *medical tourism*, Sahid Sahirman Fertility Centre menjadi klinik fertilitas pertama di Indonesia yang mengusung konsep 'medical tourism' sehingga diharapkan jumlah pasien-pasien yang berobat keluar negeri akan bisa beralih ke dalam negeri karena SSMH telah mempersiapkan paket layanan yang komperhensif dan sangat nyaman untuk pasien,” ungkap Bernard, kepada Aktual.com, dalam acara seminar media bertajuk 'Layanan Medical Tourism Hadir' di Sahid Sahirman Fertility Centre, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (29/03).

Selain itu, hadir juga dr Budi Wiweko, SpOG (K) yang merupakan Sekjen Perhimpunan Fertilitas In Vitro Indonesia (PERFITRI) sekaligus founder SMART IVF, menjelaskan bahwa tingginya prevalensi infertilitas

membutuhkan layanan yang tepat.

“Data prevalensi infertilitas cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kebutuhan pasutri terhadap layanan infertilitas cukup signifikan,” ujar Dr.Wiweko.

Kemudian, dokter Wiweko menjelaskan, mengenai potensi adanya *medical tourism* di Indonesia.

“*Medical tourism* di Indonesia tidak hanya potensial untuk mendapatkan pasien dari luar negeri, tapi yang lebih penting adalah mendapat kepercayaan pasien dalam negeri,” ungkap Wiweko.

Ia menambahkan, strategi 'medical tourism' yang tepat harus bisa diformulasikan untuk menarik kembali pasien dan devisa negara yang hilang keluar negeri,” katanya lagi.

Adapun beberapa strategi yang diterapkan antara lain, tarif kompetitif, infrastruktur fisik dan peralatan yang modern, pelayanan berkualitas yang sesuai dengan bukti ilmiah, orang-orang yang berkompeten dan siap bersaing, serta meningkatkan keterjangkauan akses. /Ferro Maulana

Negara Gagal

Satrio Arismunandar

Berbagai kondisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, yang terkesan berantakan, kacau, tak jelas arah, ditambah lagi perilaku korup yang meluas di seluruh lapisan masyarakat, membuat kita sering putus asa. Inikah “hasil terbaik” dari gerakan reformasi 1998? Padahal gerakan reformasi waktu itu kita dukung dengan gegap gempita. Situasi ini juga memunculkan wacana: Apakah Indonesia adalah negara gagal (*failed state*)?

Untuk menjawabnya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan negara gagal. Negara gagal adalah negara yang tidak bisa lagi menjalankan fungsi-fungsi dasar, seperti pendidikan, keamanan, atau pemerintahan, yang biasanya terjadi karena kekerasan yang memecah-belah atau kemiskinan ekstrem. Dalam kevakuman kekuasaan ini, rakyat menjadi korban dari faksi-faksi yang bersaing dan kejahatan. Kadang-kadang PBB atau negara-negara tetangga akan ikut campur tangan, untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan.

Bagaimanapun, negara-negara gagal tidak hanya disebabkan oleh faktor internal. Pemerintah-pemerintah asing juga bisa mendestabilisasi sebuah negara dengan mengompori perang etnik atau mendukung pasukan pemberontak, yang menyebabkan negara itu runtuh.

Dalam artikelnya “*10 Reasons Countries Fall Apart*” di *Foreign Policy* (Juli/Agustus 2012), ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson, pengarang buku *Why Nation Fails*, memberi perspektif menarik tentang mengapa bisa terjadi negara gagal, dengan memfokuskan pada lembaga-lembaga domestik dan peran para elite politik dan elite ekonomi. Dua ekonom ini memberi contoh konkret dengan apa yang disebutnya lembaga-lembaga ekonomi yang “ekstraktif” (*extractive*), yang memberi penjelasan tentang ketiadaan rangsangan untuk pertumbuhan.

Ada beberapa negara yang gagal secara spektakuler, dengan keruntuhan total semua lembaga negara. Misalnya, yang terjadi di Afganistan sesudah penarikan mundur pasukan Soviet dari negeri itu, dan digantungnya Presiden Mohammad Najibullah. Contoh lain, adalah yang terjadi selama satu dasawarsa

perang saudara di Sierra Leone, di mana keberadaan pemerintah betul-betul lenyap.

Sebagian besar negara yang runtuh, bagaimanapun, mengalami hal itu bukan seperti sebuah ledakan singkat, namun melalui rintihan panjang yang menyakitkan. Kegagalan mereka terjadi bukan dalam sebuah ledakan perang atau kekerasan, namun karena ketidakmampuan total dalam memanfaatkan potensi besar masyarakatnya untuk tumbuh, yang menterpurukkan warganya ke kemiskinan seumur hidup. Kegagalan yang lambat dan melumatkan ini menyebabkan banyak warga negara di Afrika sub-Sahara, Asia, dan Amerika Latin hidup dengan standar yang sangat jauh di bawah standar kehidupan warga di negara-negara Barat.

Yang tragis adalah bahwa kegagalan itu bukan terjadi secara kebetulan. Negara-negara itu ambruk karena mereka dikuasai oleh apa yang kita sebut lembaga-lembaga ekonomi “ekstraktif.” Yakni, lembaga yang menghancurkan insentif, mengecilkan inovasi, dan mengisap habis bakat dari para warganegaranya, dengan menciptakan lapangan bermain yang tidak adil dan merampok peluang dari mereka.

Lembaga-lembaga ini bukan ditempatkan di sana secara tak sengaja karena kekeliruan, tetapi karena maksud tertentu. Lembaga-lembaga itu ada untuk keuntungan para elite, yang meraup banyak dari ekstraksi – apakah itu dalam bentuk bahan tambang yang bernilai, tenaga kerja paksa, atau monopoli yang dilindungi – dengan merugikan masyarakat. Tentu saja, elite semacam itu mendapat keuntungan dari lembaga-lembaga politik yang diakali juga, serta memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mencondongkan sistem ke arah yang menguntungkan mereka.

Namun negara-negara yang dibangun di atas cara-cara eksploitasi itu secara tak terhindarkan akan gagal, dengan menyeret seluruh sistem yang korup itu ikut ambruk bersama mereka. Hal ini seringkali menjurus ke terjadinya penderitaan rakyat yang sangat dahsyat.

Indonesia saat ini mungkin bukan negara gagal, atau belum bisa dikategorikan sebagai negara gagal. Namun ini bukan berarti kita bisa bersantai membiarkan situasi dan kondisi “bayang-bayang kegagalan” di sekitar kita. ▀



Privatisasi PLN

Privatisasi kapitalisme global agar negara swastanisasi kegiatan di Indonesia. Dunia sejak 1977 akan jadi termasuk zona merah neoliberalisme.

Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal mencapai 7 persen per tahun, maka pemerintah pertumbuhan listriknya adalah 10 persen. Ini yang disebut dengan motor kontrol sebesar 100 persen atau pertumbuhan 100 persen ekonomi nasional. Dengan membuat kontrol 100 persen ekonomi nasional, itu adalah kebijakan yang sangat menguntungkan bagi pemerintah. Dengan membuat kontrol 100 persen ekonomi nasional, itu adalah kebijakan yang sangat menguntungkan bagi pemerintah.

Indonesian Electric Power (PLN) telah lama dikenal sebagai perusahaan publik yang menguasai pasar tenaga listrik di Indonesia. Sejak tahun 1970-an, PLN telah menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan bagi pemerintah.

Selain itu, juga melalui skema listrik, pemerintah Pusat didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar

kemudian di Albasil, investasi di kawasan industri, tahapan-tahapan perencana sektor dari pada ke sektor. Setelah terganggu energi dunia. Tentu saja ketika itu, para perencana ekonomi di Washington dalam meliberalisasi dan swastanisasi listrik Indonesia. Rencana makro listrik Perkins untuk memomokkan momentumnya privatisasi PLN pada 1997, setahun menjelang kegiatan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Kalau kita menilik kembali aksi subversi korporasi-korporasi energi global AS melalui IMF dan Bank Dunia, sebenarnya mereka sudah mengincar sektor tenaga-listrik Indonesia sejak 1970-an. Lagi-lagi Perkins punya cerita menarik tentang soal ini. Waktu itu, Pemerintah tentang Suharto sempat menerapkan Proyek Sepintas Kalu Desa atau Prolides, mata, gagasan tersebut sangat kasat mata, gagasan yang disasar dari proyek ini adalah masyarakat dari proyek agenda yang sesungguhnya, menurut pengakuan Perkins, ProLides untuk memprovokasi pemerintah Indonesia agar terjebak dalam skema utang luar negeri dengan dalih untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Rencana BUMN
Kati
bidang
Merang
Perubah
secara bi
menerima
di sektor k
yang tadiny.

Caprof
Maka Negeri
migran dan hannya

Berita teraktual tersaji,
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :

☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0838 210 4469 (Ranie) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com

memberi anda
perspektif
yang berbeda ...



aktual.com **AKTUAL** aktual 

Info Dan Pemasaran :

☎ 081517933376 (Dedy) 081280941009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com